



**BADAN POM**

# **RENCANA STRATEGIS 2025–2029**

**Balai Besar POM  
di Mataram**



(0370) Ka. 62297, TU/ULPK 612926



[bpom\\_mataram@pom.go.id](mailto:bpom_mataram@pom.go.id)



[mataram.pom.go.id](http://mataram.pom.go.id)

## DAFTAR ISI

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI.....                                        | ii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                    | iii |
| DAFTAR TABEL.....                                      | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | 1   |
| 1.1 Kondisi Umum .....                                 | 1   |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan .....                     | 21  |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN .....   | 59  |
| 2.1 Visi .....                                         | 59  |
| 2.2 Misi .....                                         | 60  |
| 2.3 Tujuan .....                                       | 61  |
| 2.4 Sasaran Kegiatan .....                             | 63  |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....              | 78  |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM .....             | 78  |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Mataram ..... | 83  |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....      | 90  |
| 4.1 Target Kinerja .....                               | 90  |
| 4.2 Kerangka Pendanaan .....                           | 93  |
| BAB V PENUTUP.....                                     | 95  |
| LAMPIRAN .....                                         | 96  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BBPOM di Mataram .....                          | 1  |
| Gambar 1. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Mataram 2020-2024 ..... | 4  |
| Gambar 1. 3 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 1 .....                     | 10 |
| Gambar 1. 4 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 2 .....                     | 10 |
| Gambar 1. 5 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 3 .....                     | 12 |
| Gambar 1. 6 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 4 .....                     | 14 |
| Gambar 1. 7 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 5 .....                     | 15 |
| Gambar 1. 8 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 6 .....                     | 15 |
| Gambar 1. 9 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 7 .....                     | 16 |
| Gambar 1. 10 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 8 .....                    | 17 |
| Gambar 1. 11 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 9 .....                    | 18 |
| Gambar 1. 12 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 10 .....                   | 19 |
| Gambar 1. 13 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 11 .....                   | 20 |
| Gambar 1. 14 Penilaian kompetensi pegawai BBPOM di Mataram .....                | 33 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Nilai dan predikat capaian kinerja.....                                                                                                                                       | 3  |
| Tabel 1. 2 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Mataram Tahun 2020-2024 .....                                                                         | 5  |
| Tabel 1. 3 Ringkasan Analisis SWOT .....                                                                                                                                                 | 57 |
| Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029 .....                                                                                                                                         | 62 |
| Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Mataram periode 2025-2029 ..... | 69 |
| Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Strategis BBPOM di Mataram .....                                                                                                                      | 73 |
| Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029 .....                                                                                                                     | 81 |
| Tabel 4. 1 Kerangka kinerja BBPOM di Mataram untuk Tahun 2025-2029 .....                                                                                                                 | 90 |
| Tabel 4. 2 Kerangka pendanaan BBPOM di Mataram 2025-2029 berdasarkan Kegiatan .....                                                                                                      | 93 |
| Tabel 4. 3 Kerangka pendanaan BBPOM di Mataram 2025-2029 berdasarkan Sumber Dana .....                                                                                                   | 94 |



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
MATARAM  
NOMOR HK.02.02.14A.12.25.150 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
MATARAM TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Mataram Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM TENTANG RENCANA STRATEGIS KEPALA BALAI BESAR POM DI MATARAM TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Mataram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Mataram memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Mataram untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Mataram sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Mataram dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Mataram.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI MATARAM,



YOGI ABASO MATARAM

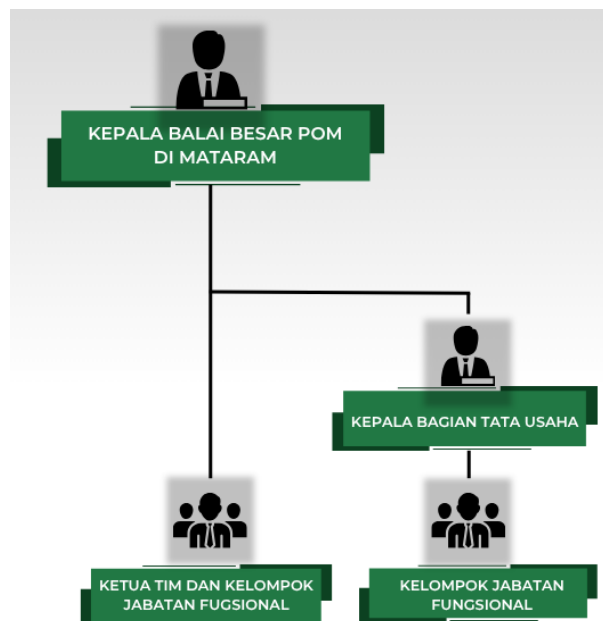


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang tersedia.

Balai Besar POM di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dimana tugas, fungsi dan kewenangan Balai Besar POM di Mataram diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun struktur organisasi BBPOM Mataram adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. 1** Struktur Organisasi BBPOM di Mataram

Balai Besar POM di Mataram bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Tugas pokok Balai Besar POM di Mataram adalah melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fungsi Balai Besar POM di Mataram antara lain:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Mataram untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Renstra BBPOM di Mataram dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Obat dan Makanan. Pendekatan ini memungkinkan BBPOM di Mataram untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BBPOM di Mataram bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

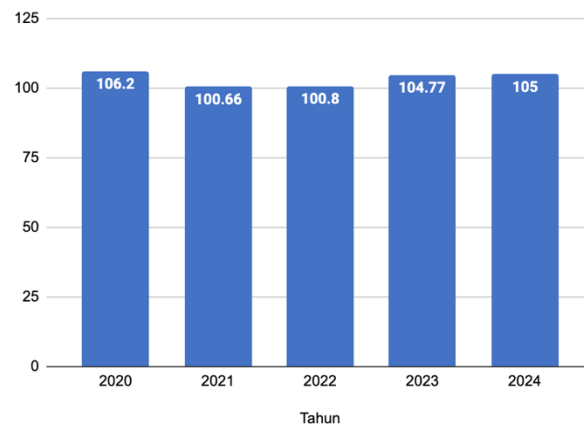
#### 1. 1. 1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BBPOM di Mataram Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Balai Besar POM di Mataram. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal seperti pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1** Nilai dan predikat capaian kinerja

| Nilai         | Predikat                |
|---------------|-------------------------|
| > 120%        | Tidak dapat disimpulkan |
| 100% s/d 120% | Sangat Baik             |
| =100%         | Baik                    |
| 70%-100%      | Cukup                   |
| <70%          | Kurang                  |

Hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.2, sedangkan nilai kinerja BBPOM di Mataram selama 5 tahun terakhir, dapat dilihat pada Gambar 1.2. Pada periode 2020 hingga 2024, kinerja bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BBPOM di Mataram selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang cukup signifikan dari tahun 2022 hingga 2024 (naik 4.20 poin).



**Gambar 1. 2** Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BBPOM di Mataram 2020-2024

**Tabel 1. 2** Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Mataram Tahun 2020-2024

| SASARAN<br>KEGIATAN/INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                               | 2020  |       |        | 2021  |       |        | 2022  |       |        | 2023  |       |        | 2024  |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
|                                                                                                                                                        | T     | R     | C%     | T     | R     | C%     | T     | R     | C%     | T     | R     | C%     | T     | R     | C%     |
| <b>SK 1-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram</b>                                              |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |
| IKSK 1-Persentase Obat yang memenuhi syarat (%)                                                                                                        | 80.80 | 84.35 | 104.39 | 84.00 | 93.35 | 111.13 | 86.60 | 77.56 | 89.56  | 90.00 | 90.48 | 100.53 | 92.30 | 97.50 | 105.63 |
| IKSK 2-Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)                                                                                                     | 78.00 | 77.96 | 99.95  | 80.00 | 70.38 | 87.98  | 82.00 | 77.92 | 95.02  | 84.00 | 78.35 | 93.27  | 83.81 | 87.01 | 103.82 |
| IKSK 3-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (%)                                                                          | 80.00 | 67.90 | 84.88  | 82.00 | 90.93 | 110.89 | 84.00 | 74.21 | 88.35  | 86.00 | 84.65 | 98.43  | 84.70 | 91.73 | 108.30 |
| IKSK 4-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (%)                                                                       | 50.00 | 66.10 | 132.20 | 70.00 | 75.00 | 107.14 | 72.00 | 88.32 | 122.67 | 76.00 | 78.90 | 103.82 | 83.17 | 82.40 | 99.07  |
| IKSK 5-Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (%) *                                                                                        | -     | -     | -      | 78.00 | 83.90 | 107.56 | 80.00 | 98.36 | 122.95 | 85.00 | 85.09 | 100.11 | 90.00 | 92.38 | 102.64 |
| <b>SK 2-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram</b>                  |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |
| IKSK 6-Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram (Indeks)   | 70.00 | 73.91 | 105.59 | 77.00 | 66.83 | 86.79  | 79.00 | 72.23 | 91.43  | 82.00 | 79.81 | 97.33  | 82.00 | 83.15 | 101.40 |
| <b>SK 3-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram</b> |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |
| IKSK 7-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)                                    | 83.00 | 86.48 | 104.19 | 87.60 | 85.10 | 97.15  | 88.70 | 90.30 | 101.80 | 89.80 | 97.80 | 108.91 | 97.90 | 97.68 | 99.78  |
| IKSK 8-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (Indeks)                                                                    | 71.00 | 74.98 | 105.61 | 76.24 | 61.64 | 80.85  | 77.50 | 70.46 | 90.92  | 78.75 | 79.61 | 101.09 | 79.70 | 79.53 | 99.79  |
| IKSK 9-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Mataram (Indeks)                                                          | 88.00 | 90.51 | 102.85 | 92.00 | 93.60 | 101.74 | 93.00 | 99.49 | 106.98 | 94.00 | 98.09 | 104.35 | 99.00 | 99.34 | 100.34 |

| SASARAN<br>KEGIATAN/INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                   | 2020  |       |        | 2021  |        |        | 2022   |        |        | 2023   |        |        | 2024   |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                            | T     | R     | C%     | T     | R      | C%     | T      | R      | C%     | T      | R      | C%     | T      | R      | C%     |
| <b>SK 4-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram</b>                                |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IKSK 10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (%)                                                               | 85.00 | 86.54 | 101.81 | 87.00 | 94.53  | 108.66 | 89.00  | 97.89  | 109.99 | 91.00  | 99.11  | 108.91 | 99.20  | 100.00 | 100.81 |
| IKSK 11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (%)                                                                 | 49.50 | 52.00 | 105.05 | 58.00 | 73.97  | 127.53 | 67.00  | 77.78  | 116.09 | 76.00  | 88.43  | 116.36 | 88.50  | 98.77  | 111.60 |
| IKSK 12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (Indeks)                                                                                  | 85.00 | 99.59 | 117.16 | 99.50 | 100.00 | 100.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| IKSK 13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (%)                                                                                            | 50.00 | 53.72 | 107.44 | 55.00 | 70.18  | 127.60 | 60.00  | 63.71  | 106.18 | 65.00  | 69.77  | 107.34 | 70.00  | 76.56  | 109.37 |
| IKSK 14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (%)                                                                                          | 55.00 | 60.61 | 110.20 | 63.00 | 73.40  | 116.51 | 66.00  | 69.61  | 105.47 | 68.00  | 76.06  | 111.85 | 76.10  | 78.09  | 102.61 |
| IKSK 15-Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram (Indeks)                                                                                                                  | 3.51  | 4.31  | 122.79 | 4.45  | 4.42   | 99.33  | 4.51   | 4.48   | 99.33  | 4.55   | 4.86   | 106.81 | 4.95   | 4.96   | 100.20 |
| IKSK 16-Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**                                                        | -     | -     | -      | -     | -      | -      | 77.00  | 87.50  | 113.64 | 79.00  | 93.33  | 118.14 | 97.00  | 98.92  | 101.98 |
| IKSK 17-Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota*** | -     | -     | -      | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 95.00  | 97.00  | 102.11 |
| <b>SK 5-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram</b>                                           |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IKSK 18-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (Nilai)                                                                                                                   | 87.77 | 91.73 | 104.51 | 93.50 | 93.46  | 99.96  | 94.90  | 94.70  | 99.79  | 96.30  | 96.72  | 100.44 | 97.60  | 98.41  | 100.83 |

| SASARAN<br>KEGIATAN/INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                           | 2020  |        |        | 2021   |        |        | 2022   |        |        | 2023   |        |        | 2024   |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                    | T     | R      | C%     | T      | R      | C%     | T      | R      | C%     | T      | R      | C%     | T      | R      | C%     |
| IKSK 19-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (Sekolah)                                                    | 16    | 16     | 100.00 | 40     | 40     | 100.00 | 62     | 62     | 100.00 | 84     | 93     | 110.71 | 106    | 117    | 110.38 |
| IKSK 20-Jumlah desa pangan aman (Desa)                                                                                             | 5     | 5      | 100.00 | 12     | 12     | 100.00 | 18     | 18     | 100.00 | 25     | 25     | 100.00 | 31     | 31     | 100.00 |
| IKSK 21-Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (pasar)                                                                        | 2     | 2      | 100.00 | 4      | 4      | 100.00 | 6      | 6      | 100.00 | 8      | 8      | 100.00 | 10     | 10     | 100.00 |
| <b>SK 6-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram</b> |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IKSK 22-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (%)                                                         | 90.00 | 93.30  | 103.67 | 100.00 | 99.14  | 99.14  | 100.00 | 99.90  | 99.90  | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 84.00  | 84.00  |
| IKSK 23-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (%)                                                      | 90.00 | 96.08  | 106.76 | 100.00 | 99.72  | 99.72  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 101.00 | 101.00 |
| <b>SK 7-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram</b>             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IKSK 24-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (%)                                                | 91.00 | 150.71 | 165.62 | 97.00  | 109.95 | 113.35 | 98.00  | 97.38  | 99.37  | 99.00  | 100.00 | 101.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| <b>SK 8-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang optimal</b>                                            |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IKSK 25-Indeks RB Balai Besar POM di Mataram (Indeks)                                                                              | 88.00 | 86.10  | 97.84  | 87.00  | 83.64  | 96.14  | 88.00  | 88.11  | 100.13 | 89.00  | 87.99  | 98.87  | 90.45  | 88.00  | 97.29  |
| IKSK 26-Nilai AKIP Balai Besar POM di Mataram (Nilai)                                                                              | 81.00 | 78.17  | 96.51  | 80.00  | 82.72  | 103.40 | 81.00  | 84.80  | 104.69 | 82.00  | 83.81  | 102.21 | 85.25  | 83.89  | 98.40  |
| IKSK 27-Nilai Pengelolaan Kearsipan ***                                                                                            | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 96.11  | 97.15  | 101.08 |
| <b>SK 9-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang berkinerja optimal</b>                                                     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IKSK 28-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Mataram (Indeks)                                                             | 75.00 | 83.60  | 111.47 | 83.50  | 84.37  | 101.04 | 83.75  | 84.71  | 101.15 | 84.00  | 90.11  | 107.27 | 90.65  | 86.88  | 95.84  |
| <b>SK 10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| IKSK 29-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (%)                                        | 80.00 | 77.70  | 97.13  | 82.00  | 83.74  | 102.12 | 87.00  | 89.90  | 103.33 | 92.00  | 93.43  | 101.55 | 95.00  | 95.74  | 100.78 |

| SASARAN<br>KEGIATAN/INDIKATOR<br>KINERJA                                                      | 2020  |        |        | 2021  |       |        | 2022  |       |        | 2023  |       |        | 2024  |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|
|                                                                                               | T     | R      | C%     | T     | R     | C%     | T     | R     | C%     | T     | R     | C%     | T     | R      | C%     |
| IKSK 30-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Mataram yang optimal (Nilai) | 1.51  | 1.82   | 120.53 | 2.00  | 1.88  | 93.75  | 2.25  | 2.80  | 124.44 | 2.50  | 2.90  | 116.00 | 3.00  | 3.00   | 100.00 |
| <b>SK 11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram secara Akuntabel</b>                |       |        |        |       |       |        |       |       |        |       |       |        |       |        |        |
| IKSK -Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Mataram (Nilai)                               | 93.00 | 93.11  | 100.12 | 95.00 | 90.80 | 95.57  | 96.00 | 90.25 | 94.01  | 97.00 | 91.65 | 94.48  | 91.15 | 92.41  | 101.38 |
| IKSK 32-Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan jasa ***                                        | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -     | -     | -      | 96.13 | 100.00 | 104.03 |
| IKSK 33-Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara ***                                             | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -     | -     | -      | 90.00 | 89.00  | 98.89  |
| IKSK 34-Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri ***                               | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -     | -     | -      | 60.00 | 76.50  | 127.50 |
| IKSK 29-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Mataram (Nilai) ****         | 92.00 | 100.00 | 108.70 | 92.00 | 92.00 | 100.00 | -     | -     | -      | -     | -     | -      | -     | -      | -      |

Keterangan:

\* dilaksanakan mulai tahun 2021

\*\* dilaksanakan mulai tahun 2022

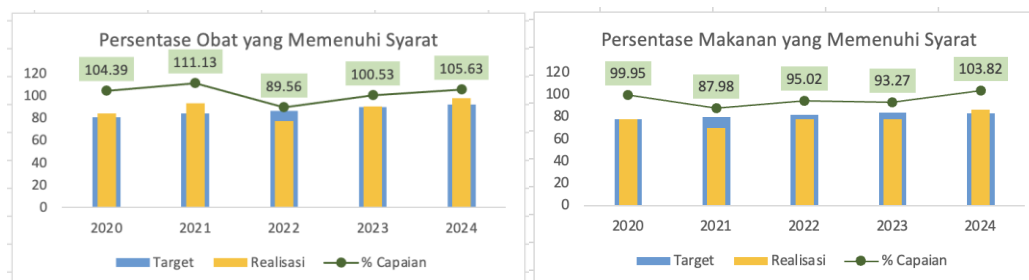
\*\*\* dilaksanakan mulai tahun 2024

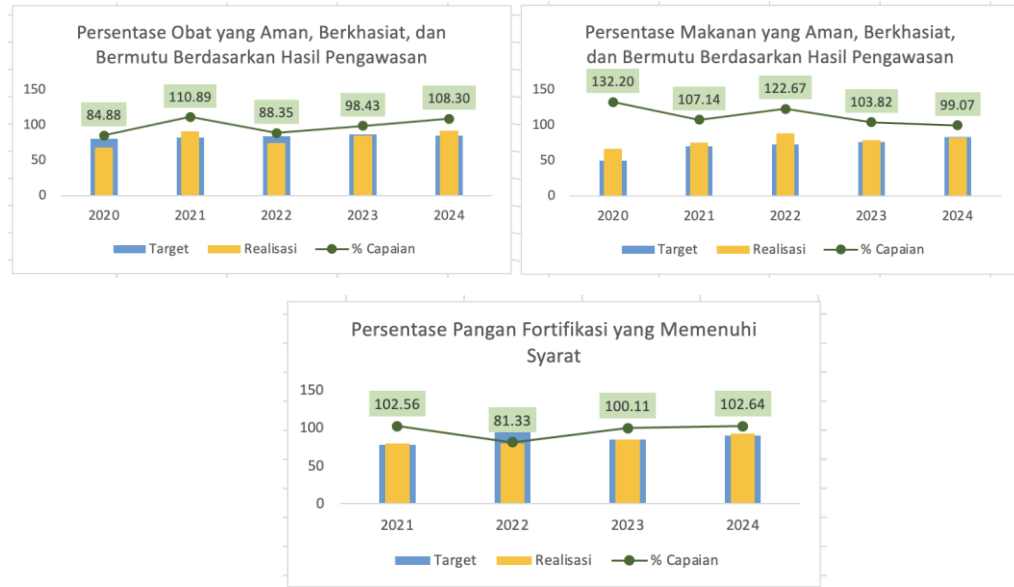
\*\*\*\* dilaksanakan pada tahun 2020-2021

BBPOM di Mataram memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

### 1. SK1-Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Mataram merupakan suatu proses yang komprehensif. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu: a) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; b) pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan secara efektif; c) meningkatkan koordinasi dengan Polda NTB dalam hal ini Korwas PPNS dan Pengadilan di NTB serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, yang bisa dilihat pada Gambar 1.3.

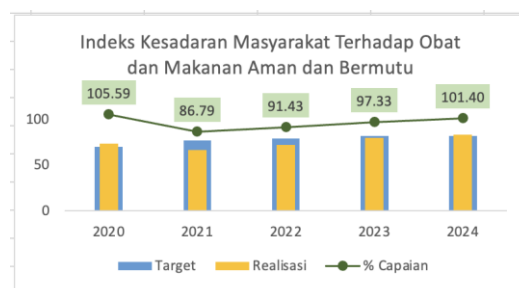




**Gambar 1. 3** Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 1

## 2. SK2-Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram

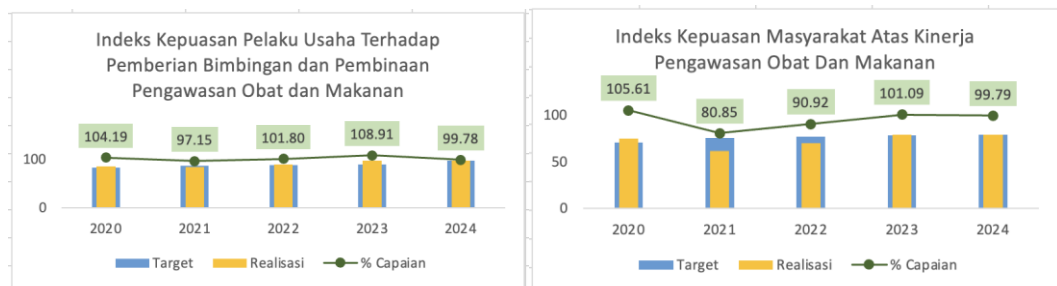
Keamanan dan mutu sediaan farmasi dan makanan di NTB memerlukan peran serta banyak pihak. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu: a) meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan; b) meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada masyarakat. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, yang dapat dilihat pada Gambar 1.4

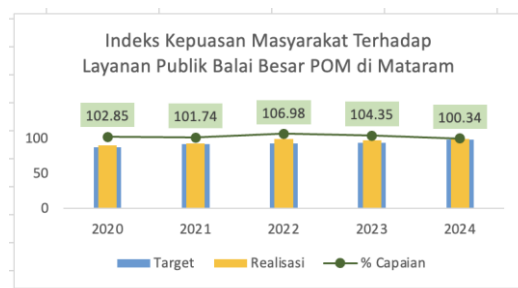


**Gambar 1. 4** Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 2

### 3. SK3-Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram

Bentuk layanan publik BBPOM di Mataram mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan dan perlindungan masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian lokal bahkan nasional. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 yaitu: a) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BBPOM di Mataram; b) meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram melalui berbagai media; c) Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja; d) melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan; e) memperhatikan saran/masukan responden pada saat pelaksanaan SKM. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT, yang dapat dilihat pada Gambar 1.5.





**Gambar 1. 5** Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 3

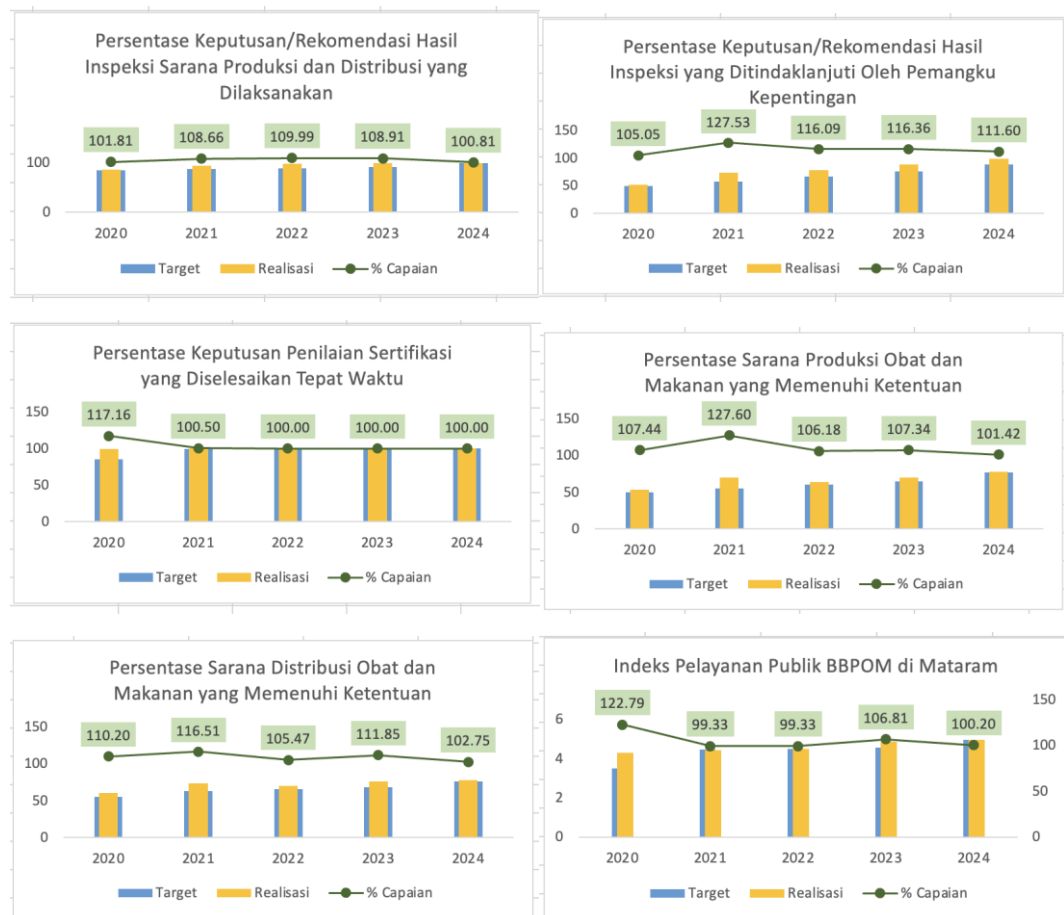
#### **4. SK4-Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram**

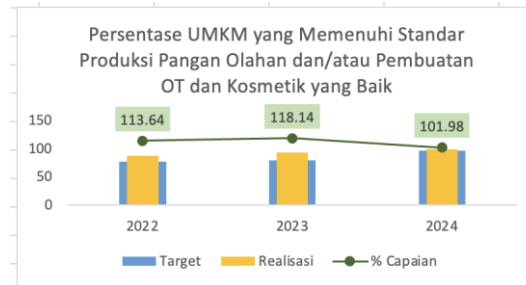
Sebagai salah satu UPT Badan POM di daerah, Balai Besar POM di Mataram dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pengawalan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu:

- a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar;
- b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring;
- c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;
- d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat;
- e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman;
- f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan;
- g) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan;
- h) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan

Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor; i) perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022. Sasaran kerja ini diukur dengan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Pelayanan Publik UPT, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang dapat dilihat pada Gambar 1.6.

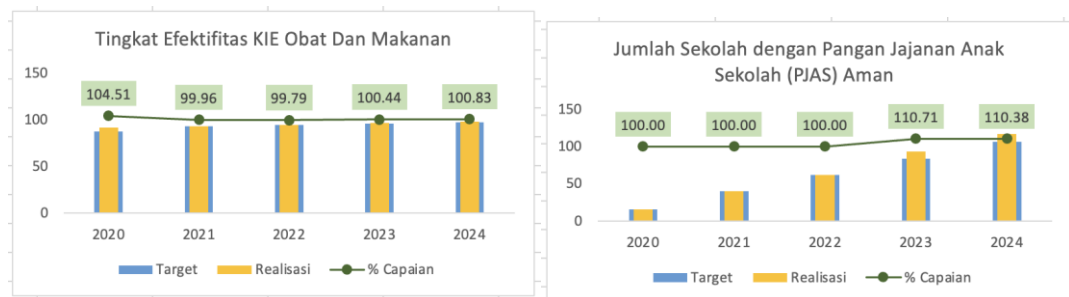




**Gambar 1. 6** Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 4

## 5. SK5-Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram

Balai Besar POM di Mataram perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Upaya yang dapat dilakukan adalah: a) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat; b) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, yang dapat dilihat pada Gambar 1.7.

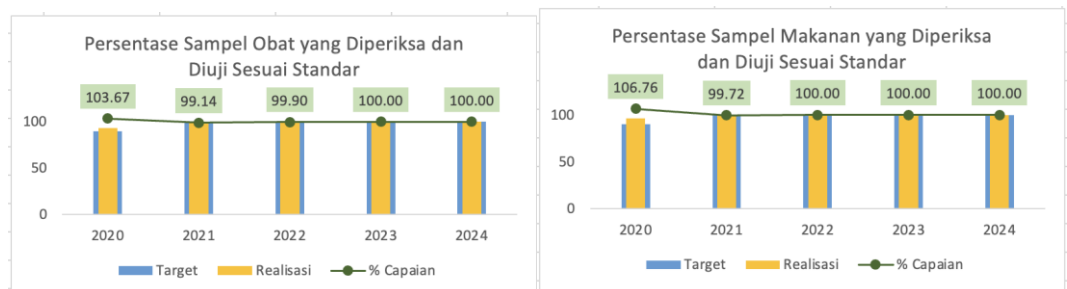




Gambar 1. 7 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 5

## 6. SK6-Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung SK6 yaitu: a) Melakukan pengujian berdasarkan metode analisis yang tepat dan efisien; b) Investasi peralatan laboratorium yang modern dan mutakhir; c) Mengadaptasikan teknik pengujian dan analisis sesuai perkembangan jaman; d) Meningkatkan program intensifikasi pengawasan produk Obat dan Makanan; e) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, yang dapat dilihat pada Gambar 1.8.

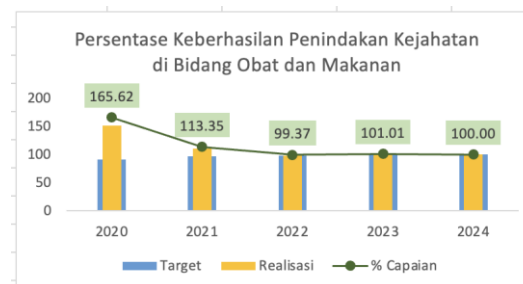


Gambar 1. 8 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 6

## 7. SK7-Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Mataram

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu

menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Mataram melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BBPOM Mataram dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, yang dapat dilihat pada Gambar 1.9.

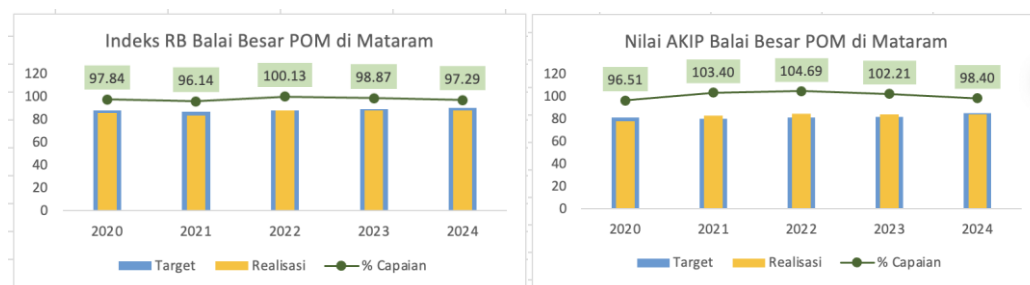


**Gambar 1. 9** Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 7

#### **8. SK8-Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Mataram yang Optimal**

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di

Mataram. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari *outcome* tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; f) penjajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama. Sasaran kegiatan ini dapat diukur dengan indikator Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan, yang dapat dilihat pada Gambar 1.10.



**Gambar 1. 10** Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 8

## 9. SK9-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Mataram yang Berkinerja Optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b)

menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan *Feedback* Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan. Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN UPT, yang dapat dilihat pada Gambar 1.11.

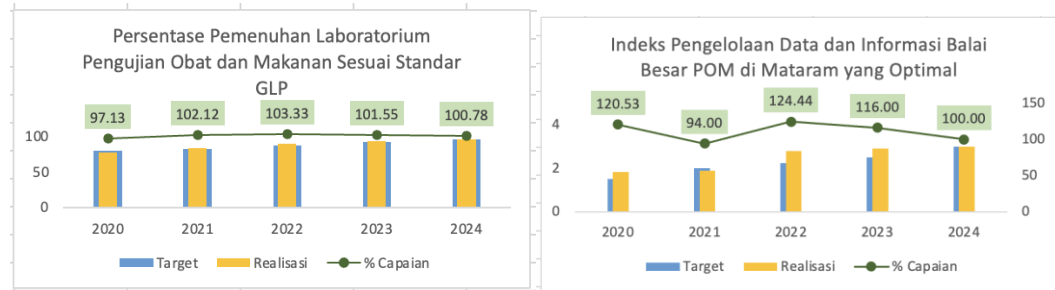


**Gambar 1. 11** Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 9

#### **10.SK10-Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah Standar Kemampuan Laboratorium yang handal melalui sistem operasional dan teknologi informasi yang memadai. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu: a) melakukan optimalisasi pada indikator-indikator penerapan manajemen SPBE yang masih di bawah level 3 serta melakukan reviu dan tindak lanjut atas reviu bagi indikator yang sudah berada di atas 3 secara berkala; b) menyusun dan merevisi peraturan - peraturan terkait SPBE; c) pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana; d) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; e) diseminasi hasil analisis kebijakan melalui forum diseminasi dan publikasi pada berbagai forum eksternal; f) memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian; g) meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil

riset dan kajian Obat dan Makanan baik secara internal, nasional maupun internasional. Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, yang dapat dilihat pada Gambar 1.12.



Gambar 1. 12 Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 10

#### 11.SK11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Mataram Secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BBPOM di Mataram dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. BBPOM di Mataram berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BBPOM Mataram *Unaudited* dan *Audited*; b) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; c) meningkatkan capaian kinerja (*output* dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; d) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat. Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri.



**Gambar 1. 13** Tren capaian indikator Sasaran Kegiatan 11

### 1. 1. 2 Aspirasi Masyarakat

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BBPOM di Mataram memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan Obat dan Makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BBPOM di Mataram dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan Obat dan Makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BBPOM di Mataram dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi Obat dan Makanan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan

penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Mataram 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk menjaring aspirasi masyarakat di wilayah kerja BBPOM di Mataram, dilakukan survei kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BBPOM di Mataram. Selain itu BBPOM di Mataram dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, melakukan survei kepuasan masyarakat serta melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Dalam menyusun Rencana Strategis BBPOM di Mataram 2025-2029, pemahaman yang komprehensif terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi menjadi faktor krusial dalam merumuskan strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan khasiat produk kesehatan dan pangan, BBPOM di Mataram dituntut untuk proaktif dalam mengantisipasi berbagai tantangan kompleks yang muncul.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi

potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Mataram dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM di Mataram dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Mataram tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM di Mataram menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Mataram, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

### **1. 1. 3 Kekuatan (*Strength*)**

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Mataram, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Mataram di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Mataram, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

**1) Komitmen Pimpinan dan Seluruh ASN Balai Besar POM di Mataram Untuk Menerapkan RB**

Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Mataram untuk menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan, komitmen ini tercermin melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan profesionalisme dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pimpinan Balai Besar POM di Mataram berperan sebagai role model dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, dengan mendorong setiap ASN untuk berkontribusi aktif dalam reformasi birokrasi melalui inovasi pelayanan dan penguatan sistem pengawasan. ASN dengan kompetensi yang memadai mendukung implementasi kebijakan berbasis bukti, memanfaatkan teknologi modern, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan.

Melalui komitmen bersama ini, Balai Besar POM di Mataram tidak hanya menargetkan pengakuan sebagai institusi yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tetapi juga berupaya mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen ini sekaligus menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## **2) Kompetensi ASN Balai Besar POM di Mataram yang Memadai Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas**

Kompetensi ASN Balai Besar POM di Mataram yang memadai menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. ASN yang berkompeten tidak hanya menguasai aspek teknis dan regulasi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. Kompetensi ini menjadi fondasi dalam memastikan setiap langkah pengawasan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai standar yang berlaku.

ASN Balai Besar POM di Mataram dilengkapi dengan berbagai keahlian yang relevan, mulai dari kemampuan analisis laboratorium, pemahaman mendalam terkait regulasi Obat dan Makanan, hingga kemampuan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Melalui penguasaan teknologi modern serta pemahaman terhadap sistem pengawasan pre-market dan post-market, ASN mampu menjalankan pengujian produk, mendeteksi pelanggaran, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk menjaga keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Lebih dari itu, kompetensi ASN juga diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, serta keterlibatan aktif dalam program peningkatan kapasitas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas Dengan kompetensi yang dimiliki, ASN Balai Besar POM di Mataram mampu memberikan pelayanan yang prima, membangun kepercayaan publik, dan mendukung tercapainya tujuan strategis institusi dalam memastikan keamanan dan mutu obat serta makanan untuk masyarakat. Kompetensi ini menjadi modal utama dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pengawasan yang efektif dan berdaya saing tinggi.

### **3) Payung Hukum yang Jelas Terkait Tugas, Fungsi dan Wewenang Dalam Pengawasan Obat dan Makanan**

Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara jelas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **4) Integritas dan Fasilitas Pelayanan Publik diakui Secara Nasional (Predikat WBK dari KemenPANRB)**

Balai Besar POM di Mataram telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) yang merupakan pengakuan secara nasional dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPANRB) atas upaya dari lembaga dalam membangun integritas dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian ini mencerminkan komitmen dari Balai Besar POM di Mataram untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari korupsi serta memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Predikat WBK bukan hanya simbol, tetapi bukti nyata atas keberhasilan BBPOM di Mataram dalam melaksanakan reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan menyediakan layanan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Seluruh fasilitas pelayanan publik yang disediakan dirancang untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan terkait Obat dan Makanan secara efektif. Capaian ini tidak lepas dari integritas tinggi yang dipegang oleh seluruh jajaran BBPOM di Mataram, yang terus berupaya

menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pengakuan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan berkontribusi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan predikat WBK yang telah diraih, BBPOM di Mataram membuktikan bahwa integritas dan dedikasi dalam pelayanan publik adalah kunci menuju keberhasilan yang berkelanjutan.

#### **5) Kemampuan Adaptasi dengan Perkembangan Terkini**

BBPOM di Mataram meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pengawasan, pendekatan berbasis risiko serta memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan lembaga nasional, pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi dan organisasi masyarakat. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta menjadikan BBPOM di Mataram sebagai lembaga yang kuat dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen BBPOM di Mataram dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri khususnya UMKM dan meningkatkan daya saing produk lokal, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan Obat dan Makanan yang aman dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, BBPOM di Mataram secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi sehingga BBPOM di Mataram dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri.

## 6) Laboratorium Pengujian yang Andal

Laboratorium pengujian yang andal adalah salah satu elemen kunci dalam memastikan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif. Laboratorium BBPOM di Mataram yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai standar ISO/IEC 17025 yang menjamin kompetensi teknis dan kualitas pengujian memainkan peran strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan manfaat produk sehingga hanya produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat yang sampai ke Masyarakat. Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Badan POM, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk yang beredar di Masyarakat. Laporan hasil pengujian laboratorium yang valid dan cepat dibutuhkan agar laporan pengujian produk, khususnya yang tidak memenuhi syarat dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi standar. Peningkatan kemampuan pengujian sesuai *Good Laboratory Practice* (GLP) dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram baik melalui pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal dan efisien, standar kompetensi tenaga penguji serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis/parameter pengujian dan jenis serta jumlah produk yang diuji. Laboratorium BBPOM di Mataram mempunyai fasilitas yang modern dan dilengkapi dengan instrumen yang canggih menggunakan teknologi yang kompleks, seperti *High-Performance Liquid Chromatography* (HPLC), *Liquid Chromatography Mass Spectrometry* (LC-MS), *Gas Chromatography-Mass Spectrometry* (GC-MS), *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry* (ICP-MS), *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk pengujian DNA. Laboratorium BBPOM di Mataram dioperasikan oleh analis dan penguji yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam metode pengujian terbaru dan dilengkapi dengan prosedur operasional standar (SOP) yang diterapkan secara konsisten.

Laboratorium pengujian yang andal dan terakreditasi diharapkan mampu melakukan pengujian terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang semakin bervariasi dan sampel KLB di NTB.

**7) Sistem Pengawasan yang Komprehensif Mencakup *Pre-Market* dan *Post-Market***

BBPOM di Mataram memiliki kekuatan utama dalam sistem pengawasan yang komprehensif, mencakup tahap pre-market dan post-market. Pada tahap pre-market, BBPOM di Mataram memastikan bahwa setiap produk yang akan diedarkan telah melalui evaluasi menyeluruh, baik dari sisi pemenuhan aspek GMP, uji laboratorium, hingga evaluasi label produk. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha, termasuk UMKM lokal, agar mampu memenuhi regulasi yang berlaku.

Sementara itu, pada tahap post-market, BBPOM di Mataram terus memantau produk yang sudah beredar melalui inspeksi rutin, sampling dan pengujian produk beredar, pengawasan label dan iklan, serta penegakan hukum terhadap produk yang tidak memenuhi standar, seperti produk tanpa izin edar atau palsu. Melalui pendekatan berbasis risiko, pengawasan terhadap produk dilakukan secara proporsional, dengan pengawasan utama pada produk dengan risiko tinggi. Integrasi kedua pendekatan ini, ditambah sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, memastikan pengawasan berjalan efektif sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen.

**8) Telah Tersertifikasi ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, OHSAS 45001:2018 dan ISO 37001:2016**

BBPOM di Mataram memiliki keunggulan utama dengan berbagai sertifikasi berstandar internasional yang telah diraih, antara lain: ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, OHSAS 45001:2018, dan ISO 37001:2016. Sertifikasi ISO 9001:2015 menunjukkan bahwa BBPOM di Mataram memiliki sistem manajemen mutu yang terstandarisasi untuk memberikan

layanan yang konsisten dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan ISO 17025:2017, laboratorium BBPOM dijamin memiliki kompetensi dalam melakukan pengujian yang valid dan akurat, mendukung kepercayaan terhadap hasil analisis yang dihasilkan. Sertifikasi OHSAS 45001:2018 menegaskan komitmen BBPOM di Mataram dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan. Sementara itu, sertifikasi ISO 37001:2016 menunjukkan upaya BBPOM di Mataram dalam menerapkan sistem manajemen anti-penyuapan yang efektif, memastikan integritas dan transparansi dalam setiap aspek operasional.

Dengan kombinasi sertifikasi ini, BBPOM di Mataram tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memastikan peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan. Keunggulan ini memperkuat peran BBPOM di Mataram sebagai institusi yang kredibel dan profesional dalam menjamin keamanan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **1. 1. 4 Kelemahan (*Weakness*)**

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan yang terus meningkat, tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Mataram dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BBPOM di Mataram dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Mataram, yang merupakan aspek yang memerlukan perhatian dan peningkatan:

### 1) Keterbatasan Jumlah SDM dengan Beban Kerja yang Ada

Jumlah SDM BBPOM di Mataram sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 berjumlah 75 orang terdiri dari 65 orang PNS dan 10 orang PPPK. Berdasarkan analisis beban kerja yang disusun pada tahun 2022 maka jumlah SDM tersebut terdapat kekurangan SDM sebanyak 27 orang. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan belum dapat dilakukan secara optimal. Dengan keterbatasan SDM dan adanya tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Mataram harus melakukan peningkatan kompetensi SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Selain itu, BBPOM di Mataram juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Keterbatasan jumlah SDM dapat menyebabkan salah satu kelemahan mendasar yaitu beban kerja yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan stres dan kelelahan di antara staf. Dengan beban kerja yang berlebihan, ada kemungkinan peningkatan resiko *human error* dalam proses fungsi teknis pemeriksaan, pengujian, atau pengawasan maupun pada proses administrasi pelaporan yang dapat berdampak buruk pada kualitas pekerjaan dan keamanan produk yang diawasi.

Dengan jumlah SDM yang terbatas, organisasi mungkin memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap beberapa individu tertentu yang memiliki keterampilan dan kualitas khusus. Hal ini dapat menambah resiko jika mereka mengalami masalah kelelahan, kesehatan atau bahkan berhenti bekerja.

Kekurangan SDM juga dapat mengakibatkan kekurangan waktu dan sumber daya untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan yang dapat menghambat peningkatan kapasitas staf untuk mengelola tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk pengadopsian teknologi terbaru dalam pengawasan.

## **2) Belum Sinkronnya Kelembagaan di Pusat (Berdasarkan Komoditi) dan Balai (Berdasarkan Fungsi)**

Ketidaksinkronan antara pendekatan kelembagaan di Badan POM Pusat yang strukturnya berdasarkan komoditi dan di Balai daerah berdasarkan fungsi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan dan pengawasan di daerah. Hal ini dapat menghambat koordinasi antara Balai dengan pemerintah daerah, masyarakat ataupun stakeholder lainnya dalam efektivitas pengawasan, pengambilan kebijakan dan penanganan isu-isu yang berkaitan dengan produk atau komoditi tertentu. Jika kebijakan dan pengawasan tidak terkoordinasi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pengawasan produk, baik di tingkat pusat maupun daerah

Dengan struktur kelembagaan yang berbeda, dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan duplikasi dalam pembagian tugas dan sumber daya, misalnya dalam pengawasan komoditi tertentu yang seharusnya menjadi kewenangan pusat, namun juga menjadi tanggung jawab Balai Besar POM di daerah. Struktur kelembagaan yang tidak sinkron juga bisa menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran.

## **3) Gap Kompetensi Pegawai Dalam Mendukung Kinerja Organisasi**

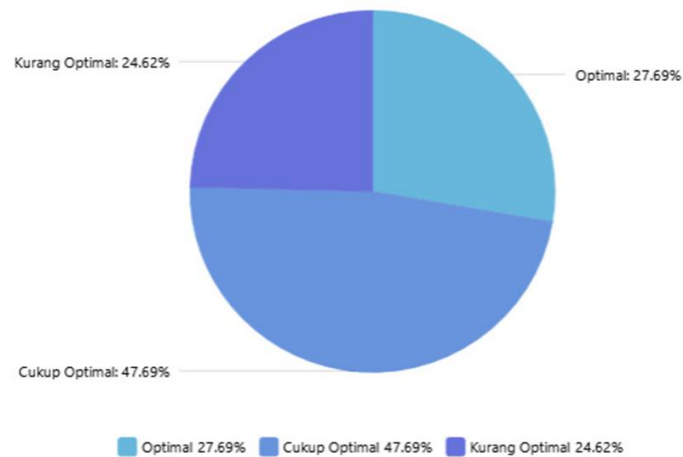
Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di

antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan baik atau dalam waktu yang tepat.

Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan profesional. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan organisasi untuk menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, organisasi dapat berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas pengawasan.

Adapun hasil penilaian kompetensi pegawai BBPOM di Mataram sebagai berikut: Optimal 18 orang (27.69%), Cukup Optimal 31 orang (47.69%) dan Kurang Optimal 16 orang (24.62%), yang dapat dilihat pada Gambar 1.14. Untuk pegawai PPPK masih belum ada data hasil penilaian kompetensi, sehingga total populasi sebanyak 65 orang PNS. Gap kompetensi tersebut menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi pegawai BBPOM di Mataram.



**Gambar 1. 14** Penilaian kompetensi pegawai BBPOM di Mataram

#### **4) Sistem Pelaporan Elektronik Belum Efektif Serta Sumber Daya Data yang dimiliki Belum dimanfaatkan Secara Optimal.**

Sistem pelaporan elektronik belum terintegrasi secara optimal, sehingga menyebabkan duplikasi pekerjaan dan meningkatkan potensi untuk kesalahan. Hal ini terjadi karena sudah input data pelaporan secara elektronik, akan tetapi masih sering kali diminta kembali data-data yang seharusnya bisa ditarik dari sistem pelaporan elektronik tersebut.

Infrastruktur sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi secara komprehensif dan diperbarui secara berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal organisasi, tetapi juga memperkuat kapabilitas dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital dalam melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk Kesehatan masyarakat.

#### **5) Pemanfaatan AI / Machine Learning / Big Data Belum Optimal Dalam Mendukung Bisnis Proses dan Peningkatan Kinerja**

Teknologi digital seperti *Artificial Intelligence*, *machine learning*, dan *big data* telah menjadi elemen kunci dalam transformasi banyak sektor, termasuk sektor pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Namun, di

Balai Besar POM di Mataram pemanfaatan teknologi ini masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan keterbatasan infrastruktur teknologi yang mampu mendukung pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam skala besar, sistem pengawasan yang sebagian besar masih mengandalkan metode konvensional yang berakibat kurang responsif terhadap ancaman baru atau tren di lapangan, kurangnya integrasi data lintas fungsi di BPOM, sehingga pengambilan keputusan sering kali memerlukan waktu lebih lama dan rentan terhadap inkonsistensi. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi digital juga yang masih perlu ditingkatkan agar mampu memanfaatkan potensi penuh dari AI dan big data. Akibat dari kelemahan ini, efektivitas dan efisiensi Balai Besar POM di Mataram dalam melakukan pengawasan kurang maksimal, sehingga membutuhkan upaya transformasi digital yang lebih terarah agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

#### **6) Program Pemberdayaan UMKM Belum Mendukung Keberlanjutan Komitmen dan Daya Saing UMKM**

Balai Besar POM di Mataram memiliki program pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kualitas produk, dan akses pasar. Namun, program ini masih menghadapi sejumlah kelemahan, antara lain: pendekatan yang kurang terfokus pada keberlanjutan, sehingga banyak UMKM tidak mampu mempertahankan standar yang telah dicapai setelah pendampingan awal selesai, kurangnya kolaborasi dengan institusi keuangan untuk membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang mendukung inovasi dan pengembangan produk dan kurangnya monitoring dan evaluasi pasca-program untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan bagi UMKM.

#### **1. 1. 5 Peluang (*Opportunity*)**

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat

membuka jalan bagi BBPOM di Mataram untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan Obat dan Makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Mataram untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

### **1) Digitalisasi Proses Bisnis BPOM untuk Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan**

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi akan meningkatkan kapasitas Balai Besar POM di Mataram untuk beroperasi sebagai instansi yang melakukan pengawasan secara dinamis dan adaptif. Hal ini sangat penting mengingat, kecepatan dan akurasi pengawasan Obat dan Makanan menjadi kunci kompetitif yang penting untuk dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan Obat dan Makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi.

Balai Besar POM di Mataram berupaya untuk mengadopsi proses digitalisasi dalam pelaksanaan pengawasan. Digitalisasi proses kerja yang dilakukan akan merevolusi cara beroperasi dan berinteraksi dengan lintas sektor terkait. Upaya digitalisasi yang telah diadopsi antara lain sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform daring untuk registrasi dan sertifikasi produk. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses kerja untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas oleh publik. Digitalisasi ini nantinya tidak hanya mempercepat proses pengawasan, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Balai Besar POM di Mataram dengan lintas sektor terkait seperti instansi pemerintah, kalangan usaha dan masyarakat.

Peluang Balai Besar POM di Mataram dalam digitalisasi proses bisnis akan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional dengan

mengurangi proses manual yang memakan waktu pada saat penilaian, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan Balai Besar POM di Mataram untuk mengawasi produk dalam waktu nyata (real-time), meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk.

## **2) Pertumbuhan Pelaku Usaha, Utamanya UMKM yang Progresif di Nusa Tenggara Barat**

Produk Obat dan Makanan di Nusa Tenggara Barat tengah berkembang sehingga memberikan peluang bagi Balai Besar POM di Mataram untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Balai Besar POM di Mataram memiliki peran strategis dalam upaya memastikan semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan sehingga konsumen mendapatkan jaminan memperoleh produk yang aman dan berkualitas serta produsen mendapatkan kepastian untuk beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Pertumbuhan ini memberi peluang bagi Balai Besar POM di Mataram untuk mendorong industri lokal di Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan reputasi sampai mancanegara. Hal ini dapat membantu produk lokal untuk memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan status industri lokal sebagai produsen yang terpercaya.

Balai Besar POM di Mataram memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri lokal melalui penerapan standar produksi yang baik sesuai *Good Manufacturing Practice* (GMP). Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk industri lokal agar dapat meningkatkan kapasitas

produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, Balai Besar POM di Mataram juga menjalankan peran sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri lokal untuk dapat bersaing menembus pasar ekspor.

Upaya Balai Besar POM di Mataram dalam meningkatkan daya saing industri lokal memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar bagi industri lokal dan mendukung penciptaan lapangan kerja. Kedua, komitmen terhadap pemenuhan standar mutu dan keamanan akan memastikan masyarakat mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Terakhir, posisi industri lokal yang kuat akan memperkuat reputasi Nusa Tenggara Barat sebagai produsen yang bertanggung jawab dan inovatif serta mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat nasional.

### **3) Tuntutan Reformasi Birokrasi dan Ekspektasi Masyarakat Terhadap Kinerja BPOM**

BBPOM di Mataram senantiasa mengimplementasikan Reformasi Birokrasi menuju *good government* and *clean governance* serta pelayanan publik yang berkualitas. Pada Tahun 2021 BBPOM di Mataram telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan hingga tahun 2024 tetap berupaya mempertahankan predikat WBK dan bertekad meraih predikat WBBM di tahun 2025.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung pada masyarakat, BBPOM di Mataram telah mengadopsi teknologi informasi, seperti layanan online, sistem pelaporan elektronik, dan aplikasi untuk mempermudah akses layanan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Atas kinerjanya tersebut BBPOM di Mataram s.d tahun 2024 dapat mempertahankan predikat kategori Layanan Prima dalam hal pelayanan publik.

Setiap proses pengawasan, sertifikasi, dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami dan

memantau pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Badan POM. Tahun 2024 BBPOM di Mataram mendapatkan predikat A di lingkungan Badan POM.

Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap BBPOM di Mataram dalam memastikan keamanan dan kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar di pasaran khususnya di Pulau Lombok. Kecepatan merespons keluhan, pemberian informasi yang akurat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran menjadi aspek penting yang diharapkan. Selain itu, masyarakat menginginkan BPOM untuk terus melakukan edukasi publik yang mendorong kesadaran terhadap pentingnya produk yang aman dan bermutu serta berdaya saing.

#### **4) Program Prioritas Makan Bergizi Gratis**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Guna mendukung kesuksesan program ini perlu kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat secara holistik menuju Indonesia Emas 2045.

Badan POM dapat mengambil peran strategis dalam program MBG melalui pengawalan di hulu dan hilir, yaitu: dukungan standarisasi dapur produksi agar sesuai ketentuan Cara Produksi yang Baik, pelatihan Keamanan Pangan kepada para penjamah pangan pada setiap SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) serta melakukan sampling dan pengujian terhadap sampel makanan yang disajikan kepada target sasaran (pelajar, ibu hamil dan menyusui). Upaya pengawalan ini perlu untuk mencegah terjadinya kontaminasi pangan yang berdampak Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang berdampak pada kesuksesan serta keberlanjutan program MBG

#### **5) Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Sebagai Wisata Super Prioritas**

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa

Tenggara Barat, merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kawasan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan pariwisata, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Keberadaan event olahraga kelas dunia, seperti MotoGP dan WSBK, memberikan peluang untuk mempromosikan Mandalika secara global sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Balai Besar POM di Mataram memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar di kawasan KEK Mandalika melalui pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi untuk mencegah produk palsu, kadaluarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang berbahaya bagi kesehatan.

Pendampingan dan sertifikasi bagi pelaku usaha lokal di KEK Mandalika untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi regulasi yang berlaku dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan dan mutu. Balai Besar POM di Mataram juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan dan obat. Ini membantu menciptakan kesadaran akan standar yang harus dipatuhi dalam industri pariwisata. Dalam pengembangan KEK Mandalika, Badan POM bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan. Ini termasuk pengawasan terhadap produk lokal yang dijual di pasar-pasar wisata.

Balai Besar POM di Mataram memiliki peran penting dalam mendukung KEK Mandalika sebagai destinasi wisata super prioritas dengan memastikan keamanan dan kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan citra KEK Mandalika sebagai destinasi wisata yang aman dan terpercaya. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPOM, dan pelaku usaha setempat dapat meningkatkan daya saing

Mandalika di pasar wisata nasional maupun internasional serta memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

#### **6) Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Semakin Meningkat**

Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas, baik itu obat-obatan, makanan, maupun kosmetik. Hal ini memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk konsumsi produk obat, makanan, dan kosmetik. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, program edukasi publik perlu diperluas. Masyarakat perlu diberitahu mengenai pentingnya memilih produk berizin BPOM, cara membaca label, dan memahami risiko yang terkait dengan produk ilegal. Saat ini, banyak orang mencari informasi *online* tentang produk yang mereka gunakan. Salah satu bentuk teknologi digital, seperti aplikasi BPOM Mobile sangat bermanfaat untuk memperkuat layanan informasi dan mempermudah akses verifikasi produk.

Selain itu, kesadaran kesehatan juga mendorong produsen untuk memenuhi standar yang lebih tinggi. Ini memberikan peluang bagi Balai Besar POM di Mataram untuk memperkuat kemitraan dengan industri dalam hal pengawasan dan sertifikasi produk. Dengan tingginya tuntutan konsumen akan produk yang aman, banyak produsen kini berusaha untuk mendapatkan sertifikasi BPOM, yang pada gilirannya membantu Balai Besar POM di Mataram menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Masyarakat yang semakin peduli pada kesehatan juga memberi dorongan politik untuk memperkuat regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan, termasuk pengendalian peredaran produk ilegal atau berbahaya.

Dengan meningkatnya minat terhadap gaya hidup sehat, membuka peluang bagi Balai Besar POM di Mataram untuk mempromosikan produk-produk yang telah memiliki izin edar BPOM yang sesuai dengan tren, seperti makanan organik, suplemen kesehatan, dan kosmetik berbahan alami.

Permintaan yang tinggi terhadap produk lokal yang sehat dan aman memberi kesempatan untuk membantu produsen Indonesia menembus pasar ekspor dengan sertifikasi yang diakui secara internasional.

Kesadaran masyarakat yang tinggi juga menciptakan peluang bagi BPOM untuk memperluas kampanye melawan hoaks kesehatan, terutama terkait produk Obat dan Makanan ilegal. Masyarakat yang lebih peka juga cenderung lebih aktif dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak sesuai standar, sehingga membantu Balai Besar POM di Mataram memperluas jangkauan pengawasannya.

## **7) Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Program *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan, menjadi peluang strategis bagi Balai Besar POM di Mataram dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan. SDGs memberikan kerangka kerja universal yang mendorong berbagai sektor untuk berkontribusi pada isu-isu global, seperti penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan, SDGs memberikan peluang kepada BBPOM di Mataram untuk memperluas cakupan pengawasan agar tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tetapi juga pada pengaruh Obat dan Makanan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai contoh, Tujuan 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) dan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) secara langsung relevan dengan upaya memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar aman, bermutu, dan mendukung pola konsumsi yang sehat.

Selain itu, pelaksanaan program SDGs membuka peluang BBPOM di Mataram untuk menjalin kemitraan lintas sektor, seperti dengan pemerintah daerah, industri, komunitas lokal, dan organisasi internasional. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, baik melalui peningkatan kapasitas teknis, penguatan regulasi, maupun edukasi

masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya keamanan Obat dan Makanan.

Sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam dan budaya yang khas, BBPOM di Mataram juga dapat memanfaatkan SDGs untuk mendukung pengembangan produk obat tradisional dan pangan lokal yang memenuhi standar internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sesuai dengan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan).

#### **8) Program Ekonomi Hijau yang Berkontribusi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mengantisipasi Dampak *Climate Change***

Penerapan program ekonomi hijau menjadi peluang strategis bagi Balai Besar POM di Mataram dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Konsep ekonomi hijau, yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi masyarakat menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Program ini juga selaras dengan upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim, termasuk emisi karbon, kerusakan ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan, program ekonomi hijau dapat memberikan peluang signifikan bagi BBPOM di Mataram untuk memastikan bahwa produk-produk yang beredar memenuhi standar keamanan, kualitas, dan lingkungan. Misalnya, pengembangan industri Obat dan Makanan organik yang memanfaatkan bahan baku lokal secara berkelanjutan dapat menjadi alternatif yang tidak hanya aman tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini relevan dengan potensi lokal di Nusa Tenggara Barat, yang kaya akan sumber daya hayati seperti tanaman obat dan bahan pangan organik.

Selain itu, implementasi program ini dapat memperkuat kolaborasi BBPOM di Mataram dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti

pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, dan akademisi, dalam membangun ekosistem produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang berkelanjutan. Dukungan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada ekonomi hijau juga membuka peluang untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan produk sekaligus mendorong inovasi dalam pengembangan produk ramah lingkungan.

#### **9) Jejaring Laboratorium di NTB untuk Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan**

Peluang Jejaring laboratorium di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Jejaring Laboratorium di NTB memiliki peran yang sangat penting, dalam hal Pengawasan Lokal yang Efisien Dengan adanya jejaring laboratorium, pengujian Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lokal oleh mitra laboratorium Balai Besar POM di Mataram tanpa perlu mengirim sampel ke daerah lain, yang menghemat waktu dan biaya. Disamping itu, Dukungan Regulasi berupa Peraturan pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan, seperti Peraturan BPOM, mendorong penguatan infrastruktur pengujian di daerah. Dalam hal Pertumbuhan Ekonomi Regional NTB, sebagai destinasi wisata dan sentra produksi pangan lokal, membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan.

Peluang Pengembangan Jejaring laboratorium di NTB melalui Kolaborasi Antar Lembaga dengan Kerjasama antara BPOM, pemerintah daerah, universitas, dan laboratorium swasta dapat memperkuat jejaring. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pengembangan kompetensi tenaga laboratorium dengan pelatihan dan sertifikasi. Investasi Teknologi: Penyediaan alat-alat modern untuk mendeteksi kontaminasi bahan kimia, mikrobiologi, dan logam berat dalam produk Obat dan Makanan.

Pendanaan dan Hibah dari pemerintah pusat atau organisasi internasional untuk mendukung pengembangan laboratorium.

#### **10) Kerja Sama Lintas Sektor yang Solid, Termasuk Dalam Penegakan Hukum**

Kerja sama lintas sektor yang solid merupakan fondasi utama dalam memastikan penegakan hukum yang efektif terkait pengawasan Obat dan Makanan. Dalam menghadapi tantangan seperti peredaran obat ilegal, makanan tidak layak konsumsi, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, industri, akademisi, serta masyarakat sangatlah penting. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui beberapa upaya strategis, yaitu: Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga melibatkan institusi seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepolisian, Bea Cukai, serta pemerintah daerah untuk berbagi informasi, melakukan operasi gabungan, dan menyusun kebijakan bersama guna memberantas pelanggaran. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi, dengan membentuk basis data terintegrasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap produk ilegal serta mempercepat proses investigasi dan penindakan. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pihak terkait, termasuk auditor, penegak hukum, dan tenaga kesehatan. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memilih produk yang aman dan sesuai standar melalui kampanye edukasi serta mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, serta Kemitraan dengan Sektor Swasta, mendorong pelaku industri untuk mematuhi regulasi melalui sertifikasi, insentif, dan dukungan dalam pengembangan produk yang memenuhi standar keamanan.

Dengan membangun kerja sama lintas sektor yang kokoh, diharapkan pengawasan terhadap Obat dan Makanan dapat lebih maksimal, sehingga

melindungi kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kepercayaan terhadap sistem regulasi yang ada.

#### **1. 1. 6 Ancaman (*Threat*)**

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen. Berikut adalah ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BBPOM di Mataram dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

##### **1) Revolusi Industri 5.0 yang Merubah Pola Budaya Masyarakat**

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk Obat dan Makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan Obat dan Makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian.

Tanpa kita sadari, setiap platform *e-commerce* berlomba lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk Obat dan Makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa *platform* seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk Obat dan Makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform *e-commerce*.

Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk Obat dan Makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan Obat dan Makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk Obat dan Makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*.

Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber Obat dan Makanan di era digital.

Data Statistik Kementerian Perdagangan RI, Jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2020, hingga pada tahun 2023 jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia sebanyak 58,63 juta pengguna. Jumlah pengguna *e-commerce* di

Indonesia diperkirakan akan terus meningkat antara hingga tahun 2029 mencapai 99,1 juta pengguna. Pengaduan konsumen terkait belanja *online* pada tahun 2023 menyumbang 13,1% dari total pengaduan kepada YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi online dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Jumlah pembeli *online* diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai USD 5.790 pada tahun 2022, penggunaan internet di Indonesia dengan rata-rata waktu 4 jam 48 menit, perkembangan periklanan di Indonesia yang diperkirakan akan menghabiskan USD 2,85 miliar untuk iklan digital. Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan

digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

## **2) Maraknya Penjualan Obat dan Makanan ilegal Secara *online***

Di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap Obat dan Makanan. Melalui platform daring seperti *marketplace*, media sosial, dan situs web, masyarakat kini dapat dengan mudah membeli produk yang mereka butuhkan tanpa harus keluar rumah. Namun, di balik kemudahan ini, muncul tantangan serius berupa maraknya peredaran Obat dan Makanan ilegal secara *online*.

Produk Obat dan Makanan ilegal sering kali tidak memiliki izin edar dari Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Produk ini tidak melalui proses uji keamanan dan mutu yang sesuai standar, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko membeli produk dari sumber yang tidak terpercaya.

Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online terjadi karena beberapa faktor utama antara lain: 1. Kemudahan Penjualan dan Anonimitas di Platform Daring, Penjual dapat memanfaatkan *marketplace* atau media sosial tanpa harus melalui proses verifikasi yang ketat. Anonimitas memungkinkan mereka berpindah platform dengan mudah ketika terdeteksi; 2. Kurangnya Edukasi Konsumen, Banyak masyarakat tergiur oleh harga murah, klaim berlebihan, atau kemudahan akses tanpa memeriksa legalitas dan keamanan produk; 3. Pengawasan yang Terbatas, Meski otoritas seperti BPOM telah melakukan pengawasan intensif, luasnya jangkauan *platform digital* membuat pengawasan menjadi tantangan besar. 4. Keuntungan Besar Bagi Pelaku Ilegal Penjualan produk ilegal menawarkan margin keuntungan yang tinggi, mendorong banyak pihak untuk mengabaikan aturan demi meraup keuntungan.

Maraknya peredaran Obat dan Makanan ilegal secara *online* tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kesehatan tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak adil bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan. Produk ilegal juga menimbulkan kerugian ekonomi dan pelanggaran hukum yang merusak integritas pasar.

Oleh karena itu, fenomena ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, platform digital, dan masyarakat. Upaya pengawasan, edukasi, serta penegakan hukum harus terus ditingkatkan untuk memastikan produk yang beredar di pasaran aman, legal, dan berkualitas.

### **3) Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk**

Perubahan demografi dan komposisi penduduk, termasuk peningkatan jumlah penduduk usia muda dan lansia, memberikan tantangan signifikan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini berpotensi memberikan tekanan besar terhadap kapasitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengantisipasi dampak dari dinamika demografi yang terus berkembang.

Pertumbuhan jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan, membawa peningkatan signifikan dalam kebutuhan obat-obatan, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam memastikan semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Bersamaan dengan itu, peningkatan proporsi penduduk lanjut usia memperluas kebutuhan akan produk khusus, seperti obat-obatan geriatrik dan suplemen. Namun, tingginya permintaan produk ini juga meningkatkan risiko beredarnya produk ilegal atau palsu yang dapat membahayakan masyarakat.

Urbanisasi yang masif dan migrasi penduduk ke perkotaan turut menciptakan tantangan baru. Konsentrasi pasar di wilayah perkotaan menyulitkan pengawasan di daerah terpencil dan rural, di mana penyebaran produk tidak aman atau ilegal dapat meningkat akibat

lemahnya pengawasan. Selain itu, perubahan gaya hidup dan diversifikasi kebutuhan masyarakat, seperti tren pola makan sehat, penggunaan produk herbal, dan veganisme, memunculkan berbagai produk baru di pasar yang memerlukan pengawasan lebih ketat.

Perubahan komposisi sosial-ekonomi juga menjadi perhatian. Kenaikan kelas menengah mendorong peningkatan konsumsi produk impor, yang sering kali belum tentu sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. Ditambah lagi, rendahnya tingkat literasi tentang keamanan produk di beberapa wilayah pengawasan BBPOM di Mataram menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang aman.

Hal ini semakin diperparah oleh pengaruh digitalisasi, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung berbelanja melalui platform *e-commerce*. Tanpa sistem pengawasan digital yang memadai, potensi peredaran produk ilegal di *platform online* sulit dikendalikan.

#### **4) Maraknya Peredaran OOT di Kalangan Mahasiswa dan Pelajar**

Maraknya peredaran Obat-Obatan Tertentu (OOT) di kalangan mahasiswa dan pelajar ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya berpotensi membahayakan kesehatan generasi muda, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan masa depan bangsa. Peredaran OOT secara ilegal di kalangan mahasiswa dan pelajar mengalami peningkatan, baik melalui jalur *offline* maupun *online*. Obat-obatan ini, termasuk obat penenang, stimulan, atau suplemen yang tidak terdaftar, sering kali dianggap sebagai solusi cepat untuk mengatasi tekanan akademik atau sosial. Sayangnya, konsumsi OOT tanpa pengawasan medis yang benar dapat menyebabkan keracunan, gangguan kesehatan jangka panjang, bahkan kecanduan.

Salah satu faktor utama yang memicu tingginya peredaran OOT adalah kemudahan akses melalui *platform* digital. *Platform e-commerce* dan media sosial kini menjadi saluran utama distribusi OOT ilegal, mempersulit pengawasan dan penindakan oleh BBPOM di Mataram. Dalam banyak

kasus, pelaku memanfaatkan celah regulasi dan teknologi untuk menyembunyikan aktivitas mereka, membuat peredaran OOT semakin sulit dilacak.

Selain itu, kurangnya literasi tentang bahaya OOT di kalangan mahasiswa dan pelajar menjadi tantangan besar. Banyak yang tidak menyadari risiko kesehatan yang serius dari penggunaan obat-obatan tertentu tanpa resep yang sah. Perubahan tren sosial di lingkungan pendidikan, di mana konsumsi OOT dianggap wajar untuk meningkatkan produktivitas atau mengatasi tekanan, semakin memperparah masalah ini.

Keterbatasan sinergi antara BBPOM di Mataram dengan institusi pendidikan, kepolisian, dan otoritas lokal membuat pengawasan terhadap peredaran OOT di area kampus dan sekolah menjadi kurang optimal. Di sisi lain, rendahnya kapasitas penegakan hukum dan keterbatasan sumber daya membuat pemberantasan jaringan distribusi OOT ilegal memakan waktu lebih lama.

#### **5) Penyerahan Antibiotik Tanpa Resep Dokter Masih Tinggi yang Berdampak AMR**

Balai Besar POM di Mataram memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas obat yang beredar di Masyarakat. Ancaman penyerahan antibiotik tanpa resep dokter yang berisiko terjadinya AMR adalah masalah yang cukup serius. Fenomena serius ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya menggunakan antibiotik yang tepat dan benar, cenderung menganggap antibiotik sebagai obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini yang mendorong penggunaan antibiotik tanpa resep dokter sehingga meningkatkan risiko AMR. Upaya mengedukasi Masyarakat terkait bahaya menggunakan antibiotik tanpa resep dokter dan dampaknya terhadap AMR telah dilaksanakan namun belum mencapai semua lapisan Masyarakat terutama daerah terpencil atau pedesaan.

Masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan antibiotika ditunjang dengan penjualan antibiotika secara bebas di apotik, toko obat maupun secara daring melalui berbagai *platform e-commerce*, keterbatasan pengawasan yang tidak memadai yang memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk membeli antibiotika tanpa resep dokter. Pemberian sanksi terhadap apotik atau pedagang yang melanggar aturan tentang penjualan antibiotika tanpa resep dokter masih kurang keras menyebabkan terjadinya pelanggaran terus berulang tanpa dampak yang berarti. Faktor penyebab yang memiliki peran juga dalam peningkatan AMR adalah faktor ekonomi, masyarakat tidak mampu untuk berobat ke dokter karena biaya konsultasi yang mahal atau sulit terjangkau sehingga memilih untuk membeli antibiotika secara mandiri di apotik atau toko obat.

Pengendalian AMR belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pemerintah Daerah atau OPD terkait, tenaga medis, pelaku usaha dan masyarakat sehingga penanganan atau pengendalian AMR belum optimal atau komprehensif.

#### **6) Masih Tingginya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Boraks Dalam Kerupuk**

Penyalahgunaan bahan berbahaya boraks dalam kerupuk menjadi ancaman yang dihadapi BBPOM di Mataram karena bila hal ini tidak diatasi maka akan memberikan dampak negatif diantaranya akan terjadi peningkatan kegiatan pengawasan, rusaknya citra dan reputasi, meningkatnya risiko Kesehatan Masyarakat, pemborosan sumberdaya serta kesulitan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Sebenarnya penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) sudah umum digunakan Masyarakat dalam keseharian untuk meningkatkan rasa, pengembang, perenyah, pengental dan pengawet, namun masih banyak ditemukan bahan tambahan pangan yang bersifat berbahaya dan dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti bahan berbahaya boraks pada kerupuk yang disalahgunakan dalam pangan. Banyak faktor

yang menjadi penyebabnya diantaranya: Faktor ekonomi, sangat mempengaruhi karena penggunaan bahan berbahaya boraks, produsen kerupuk akan mengeluarkan biaya produksi yang lebih murah karena bahan berbahaya boraks umumnya lebih murah dibandingkan BTP yang aman, kerupuk menjadi lebih renyah, lebih putih, dan tampak lebih menarik sehingga dapat meningkatkan daya tarik di pasar yang akan memberikan keuntungan besar. Produsen kerupuk di NTB kurang memahami sepenuhnya bahaya penggunaan boraks dalam makanan, tidak menyadari dampak jangka panjang bagi kesehatan konsumen.

Walaupun KIE telah diberikan melalui berbagai media namun belum sepenuhnya efektif atau belum mencapai seluruh lapisan Masyarakat termasuk pelaku usaha sehingga masalah ini ada di masyarakat. Hal ini tidak sepenuhnya dibebankan kesalahannya kepada produsen kerupuk karena produsen memproduksi didasari dengan adanya permintaan dari konsumen yang seringkali memilih kerupuk boraks yang lenih menarik dan renyah karena Boraks dapat memberikan efek visual dan tekstural yang lebih diinginkan oleh konsumen yang tidak mengetahui atau tidak terlalu memikirkan kandungan bahan kimia berbahaya dalam makanan.

Hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong produsen untuk menggunakan boraks meskipun ada potensi bahaya Kesehatan disamping itu, produsen kerupuk maupun Masyarakat belum mendapatkan informasi terkait bahan pengganti boraks yang lebih aman dan alami, seperti penggunaan STPP (sodium Tripolifosfat). Meskipun Balai Besar POM dan instansi terkait lainnya sudah melakukan pengawasan, seringkali proses penanganan terhadap pelanggaran ini berjalan lambat atau belum cukup tegas. Penindakan terhadap pelanggaran kurang cepat dan konsisten sehingga pelaku usaha merasa tidak takut atau tidak mendapatkan efek jera, penyalahgunaan boraks terus berlanjut.

BBPOM di Mataram perlu mengambil langkah yang lebih strategis dan efektif dan berkolaborasi dengan pihak terkait termasuk Dinas Kesehatan,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pol PP, Penyidik untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta memperluas edukasi untuk masyarakat dan pelaku usaha.

#### **7) Komitmen Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Ketentuan Belum Konsisten**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, industri lokal di Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Hal ini disebabkan kemudahan dalam pengurusan perizinan bagi pelaku usaha, salah satu kelompok usaha yang menikmati kemudahan adalah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Pertumbuhan industri lokal dan produk Obat dan Makanan juga mendorong pertumbuhan produk dengan izin edar produk Badan POM.

Salah satu kemudahan yang diberikan yaitu penyederhanaan persyaratan yang diberikan kepada kelompok usaha mikro kecil (UMK) pangan olahan dan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) obat tradisional dan kosmetika baik berupa pemenuhan persyaratan standar yang dapat dilakukan secara bertahap maupun pemenuhan standar dengan komitmen. Industri lokal di Nusa Tenggara Barat didominasi oleh UMK Pangan Olahan, kemudian disusul oleh UMKM Kosmetik dan terakhir UMKM Obat Tradisional.

Namun, hasil pengawasan sarana produksi UMKM dan hasil pengujian produk UMKM masih ditemukan adanya ketidaksesuaian. Hal ini berpotensi adanya produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang beredar di masyarakat dan dapat mengakibatkan kejadian yang mengancam kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya. Ketidaksesuaian yang ditemukan diakibatkan oleh ketidakkonsistenan pelaksanaan *Good Manufacturing Practice* (GMP) karena kurangnya komitmen dan pengendalian internal yang dilakukan

pelaku usaha. Potensi ketidaksesuaian ini perlu dikendalikan oleh Balai Besar POM di Mataram dengan melakukan pengawasan dan pembinaan.

**8) Jenis Produk Obat dan Makanan yang Beredar Sangat Bervariasi**

Beragamnya jenis produk, mulai dari obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional, hingga produk inovasi seperti bioteknologi dan pangan fungsional, menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan keterbatasan sumber daya (tenaga ahli, fasilitas laboratorium) untuk mengawasi semua kategori produk secara efektif. Selain itu, munculnya produk inovatif berbasis teknologi baru (misalnya, obat biologis, pangan hasil rekayasa genetik, atau nanoteknologi) serta Tren konsumen yang beralih ke produk herbal, organik, atau berbasis alami menambah variasi jenis produk di pasar yang sering kali lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya sehingga BPOM menghadapi tantangan dalam mengawasi dan mengevaluasi produk tersebut karena kurangnya referensi atau standar pengujian yang mapan.

Meningkatnya jumlah dan jenis produk yang diawasi tidak selalu diimbangi dengan penambahan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Hal ini dapat mengakibatkan pengawasan yang kurang optimal terhadap beberapa jenis produk yang beredar, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

**9) Rendahnya Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Pelaku Usaha Obat dan Makanan**

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Sektor Obat dan Makanan merupakan salah satu industri strategis yang berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat sekaligus

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, perkembangan sektor ini menghadapi tantangan besar, terutama yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis sebagian pelaku usaha. Terutama pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masalah ini menjadi hambatan dalam memenuhi standar mutu, keamanan, dan regulasi yang ditetapkan. Banyak pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), belum sepenuhnya memahami persyaratan perizinan, seperti Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)., Pelaku usaha sering kali tidak memiliki akses terhadap pelatihan teknis atau panduan standar yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. Banyak pelaku usaha belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses produksi sesuai standar keamanan dan mutu. Desakan untuk menekan biaya produksi agar tetap kompetitif sering kali membuat pelaku usaha mengabaikan aspek teknis dan regulasi.

Dampak Strategis terhadap hal tersebut adalah Rendahnya Kualitas Produk sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan merusak citra industri Obat dan Makanan. Ketidakpatuhan terhadap Regulasi Pelaku usaha cenderung tidak memenuhi persyaratan legal, seperti izin edar dari BPOM, yang dapat menghambat akses produk ke pasar yang lebih luas. Ketidaksesuaian dengan standar seringkali menghasilkan produk murah yang merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi yang mengakibatkan Persaingan Tidak Sehat. Rendahnya kemampuan teknis membuat banyak UMKM kesulitan berkembang atau berdaya saing di pasar lokal dan global.

Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis pelaku usaha Obat dan Makanan merupakan isu strategis yang membutuhkan pendekatan holistik. Upaya peningkatan kapasitas melalui edukasi, pendampingan, dan akses teknologi harus menjadi prioritas untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif, patuh regulasi, dan berdaya saing.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi industri, dan masyarakat, pelaku usaha dapat didorong untuk menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar global.

Berbagai potensi dan permasalahan di BBPOM di Mataram dirangkum pada Tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1. 3** Ringkasan Analisis SWOT

| <b><i>STRENGTH</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><i>WEAKNESS</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Mataram untuk menerapkan RB</li> <li>2 Kompetensi ASN Balai Besar POM di Mataram yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas</li> <li>3 Payung hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan wewenang dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>4 Integritas dan fasilitas Pelayanan Publik diakui secara Nasional (Predikat WBK dari KemenPAN RB)</li> <li>5 Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini</li> <li>6 Laboratorium pengujian yang andal</li> <li>7 Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post-market</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Keterbatasan jumlah SDM dengan beban kerja yang ada</li> <li>2 Gap kompetensi pegawai dalam mendukung kinerja organisasi</li> <li>3 Sistem pelaporan elektronik belum efektif serta sumber daya data yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>4 Pemanfaatan <i>AI / machine learning / big data</i> belum optimal dalam mendukung bisnis proses</li> <li>5 Program pemberdayaan UMKM belum mendukung keberlanjutan pertumbuhan</li> </ol> |

| <b>OPPORTUNITIES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>THREATS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Digitalisasi proses bisnis BPOM untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan</li> <li>2 Pertumbuhan pelaku usaha, utamanya UMKM yang progresif di Nusa Tenggara Barat</li> <li>3 Tuntutan Reformasi Birokrasi dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BPOM</li> <li>4 Program Prioritas Makan Bergizi Gratis</li> <li>5 Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai wisata super prioritas</li> <li>6 Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat</li> <li>7 Program Sustainable Development Goals (SDGs)</li> <li>8 Program ekonomi hijau yang berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengantisipasi dampak climate change</li> <li>9 Jejaring Laboratorium di NTB untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>10 Kerja sama lintas sektor yang solid termasuk dalam penegakan hukum</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Revolusi industri 5.0 yang merubah pola budaya Masyarakat</li> <li>2 Maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara <i>online</i></li> <li>3 Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk</li> <li>4 Maraknya peredaran OOT di kalangan mahasiswa dan pelajar</li> <li>5 Penyerahan antibiotik tanpa resep dokter masih tinggi yang berdampak AMR</li> <li>6 Masih tingginya penyalahgunaan Boraks dalam kerupuk</li> <li>7 Komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan belum konsisten</li> <li>8 Jenis produk Obat dan Makanan yang beredar sangat bervariasi</li> <li>9 Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis pelaku usaha Obat dan Makanan</li> </ol> |

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

#### **2.1 Visi**

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Obat dan Makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. BBPOM di Mataram dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sejalan dengan Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029, yaitu: **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.**

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

##### **1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**

Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

##### **2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**

BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan

produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

### **3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**

BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

### **4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera**

Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

## **2.2 Misi**

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai Besar POM di Mataram mengacu pada misi BPOM yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

## 2.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Mataram telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BBPOM di Mataram untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

### 1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.**

Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Mataram dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

### 2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.**

Melalui tujuan ini, BBPOM di Mataram bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

### 3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang Kuat pada UMKM.**

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan

farmasi dan pangan olahan. BBPOM di Mataram berupaya berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** Tujuan ini menekankan peran BBPOM di Mataram dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.** Melalui tujuan ini, BBPOM di Mataram berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BBPOM di Mataram dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BBPOM di Mataram tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai Besar POM di Mataram sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2. 1** Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

| No | Tujuan                                                              | Indikator                                                                                  | Target |       |       |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                     |                                                                                            | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1  | Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu | 74.75  | 76.40 | 77.75 | 79.45 | 80.70 |

| No | Tujuan                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                    | Target |       |      |       |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------|
|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                              | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 |
| 2  | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu                                                                        | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 88.2   | 88.6  | 88.9 | 89.2  | 89.4 |
| 3  | Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM | Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan   | 63.6   | 66.2  | 69.3 | 72.7  | 76.7 |
| 4  | Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                                      | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan               | 74.4   | 75.9  | 77.1 | 78.5  | 79.9 |
| 5  | Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima                                                                     | Indeks RB BPOM                                                                               | 96.3   | 96.35 | 96.4 | 96.45 | 96.5 |

## 2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Mataram, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Mataram akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

### **SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Mataram**

BBPOM di Mataram memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna

melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Mataram berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), BBPOM di Mataram berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Mataram
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Mataram sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

## **SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. BBPOM di Mataram berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

## **SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE**

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BBPOM di Mataram untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. BBPOM di Mataram harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat

dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Mataram
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

**SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, BBPOM di Mataram berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

**SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Mataram**

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BBPOM di Mataram. Dalam mendukung upaya tersebut, BBPOM di Mataram berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan

berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Mataram.

**SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Mataram**

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BBPOM di Mataram untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, BBPOM di Mataram mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

**SK 7: Layanan Publik BBPOM di Mataram yang prima**

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. BBPOM di Mataram berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Mataram.

#### **SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan BBPOM di Mataram merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BBPOM di Mataram dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Mataram periode 2025-2029**

**Visi:**  
**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

| <b>Misi BPOM</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tujuan BPOM</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Sasaran Strategis BPOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sasaran Kegiatan BBPOM di Mataram</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat | <p>Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i></p> | <p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:</i><br/>           1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i><br/>           2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i><br/>           3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i></p> | <p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p> <p><i>Indikator:</i><br/>           1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i><br/>           3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i><br/>           5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i><br/>           7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i><br/>           8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i></p> |

| Misi BPOM | Tujuan BPOM                                                                          | Sasaran Strategis BPOM                                                                                             | Sasaran Kegiatan BBPOM di Mataram                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                      | 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                      | 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                 |
|           |                                                                                      | 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                       | 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                     |
|           |                                                                                      | 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan | 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                   |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                             |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                        |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium          |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                              |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)                                     |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                                 |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | Indikator:                                                                                                             |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan              |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|           | Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | Indikator:                                                                                                             |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                  |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    | Indikator:                                                                                                             |
|           | Indikator:                                                                           | Indikator:                                                                                                         | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                        |
|           |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                        |

| <b>Misi BPOM</b>                                                                                                                                                           | <b>Tujuan BPOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sasaran Strategis BPOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sasaran Kegiatan BBPOM di Mataram</b>                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>Indikator:<br/>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>                                                                                                                       |
| Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing | <p>Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM</p> <p><i>Indikator:<br/>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i></p> | <p>Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p> <p><i>Indikator:<br/>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i></p> | <p>Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu</p> <p><i>Indikator:<br/>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i></p> |
| Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan                                                                                       | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan                                                                                                                                                                                                                                           | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                                                                                                                                                                | <p>Meningkatnya efektivitas KIE</p> <p><i>Indikator:</i></p>                                                                                                                                                                                         |

| Misi BPOM                                                                                                                                              | Tujuan BPOM                                                                                                                                                                 | Sasaran Strategis BPOM                                                                                                                                                 | Sasaran Kegiatan BBPOM di Mataram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan                                                                                           | <p>Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i></p> | <p>yang Aman dan Bermutu</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i></p>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</li> <li>2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</li> <li>3. Jumlah desa pangan aman</li> <li>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | <p>Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks RB BPOM</i></p>             | <p>Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks RB BPOM</i></p> | <p>Layanan Publik UPT yang prima</p> <p><i>Indikator:</i><br/><i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i></p> <hr/> <p>Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal</p> <p><i>Indikator:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</li> <li>2. Nilai AKIP UPT BPOM</li> <li>3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</li> <li>4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</li> <li>5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT</li> <li>6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar</li> <li>7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</li> </ol> |

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan BBPOM di Mataram 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BBPOM di Mataram untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan BBPOM di Mataram sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

**Tabel 2. 3** Indikasi Risiko Sasaran Strategis BBPOM di Mataram

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                        | Indikasi Risiko                                                                                                | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                                                                                                   | Indikasi PJ Perlakuan                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Mataram | Meningkatnya jumlah kasus KLB KP di wilayah kerja BBPOM di Mataram                                             | 1. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP                                                                  | 1. Fungsi Pemeriksaan<br>2. Fungsi Pengujian |
|    |                                                                                                         | Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan                        | 1. Pemanfaatan program regionalisasi laboratorium<br>2. Optimalisasi dan Efisiensi Internal (Optimalisasi Penggunaan Alat Eksisting & Preventive Maintenance)<br>3. Pengajuan Anggaran Berbasis Data Risiko | 1. Fungsi Pengujian<br>2. Bagian Tata Usaha  |
|    |                                                                                                         | Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya     | 1. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam di fasilitas peredaran                                                                                                                                          | Fungsi Pemeriksaan                           |
|    |                                                                                                         | Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM | 1. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek.<br>2. Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre-market                                                                                | Fungsi Pemeriksaan                           |

|   |                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                        |                                                                                               | <p>maupun post market.</p> <p>3. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha.</p> <p>4. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.</p>                                                         |                                                         |
|   |                                                                                                        | Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan            | <p>1. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</p> <p>2. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan.</p> <p>3. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor</p> | Fungsi Pemeriksaan                                      |
| 2 | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                 | Tingginya ketidaksesuaian Mutu/Kadar Fortifikan Produk Akhir serta Kendala Kepatuhan dan Data | <p>1. Memprioritaskan pengujian sampel fortifikasi dengan riwayat temuan ketidaksesuaian.</p> <p>2. Peningkatan <i>Self-Control</i> dan Akuntabilitas Produsen Pangan Fortifikasi; seperti pelaksanaan audit mendalam dan penyelenggaraan bimtek GMP serta QC yang baik.</p>                                                                                                                                              | <p>1. Fungsi Pengujian</p> <p>2. Fungsi Pemeriksaan</p> |
| 3 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                    | <p>1. Pembangunan kesepahaman antara BBPOM Mataram (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.</p> <p>2. Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan</p>                                                                                                                                                                     | Fungsi Penindakan                                       |

|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | <p>Pangan Olahan dengan Kejaksaaan Agung/Tinggi/Negeri</p> <p>3. Peningkatan kompetensi PPNS BBPOM di Mataram dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|   |                                                                                                                        | Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring                                                                                                        | <p>1. Mengusulkan rancangan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan dan Transaksi Melalui Sistem Elektronik dalam lingkup peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan legal secara Daring.</p> <p>2. Memperkuat koordinasi dengan seluruh <i>stakeholder</i> terkait penerapan kebijakan <i>Negative List</i>.</p> <p>3. Melakukan perkuatan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring</p> | Fungsi Penindakan  |
| 4 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti. | <p>1. Optimalisasi <i>Dashboard</i> Penindakan yang terintegrasi nasional.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan sibe.</p> <p>3. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</p>                                                                                                                                                                                                                            | Fungsi Penindakan  |
| 5 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Rendahnya partisipasi dan komitmen UMKM                                                                                                                                                            | Melakukan <i>Incentive-Based &amp; Kemitraan Inovatif</i> , dengan menghubungkan pendampingan pemenuhan standar (PIRT/izin edar) dengan akses pasar (e-katalog/ritel modern) atau kemudahan modal/pembiayaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fungsi Pemeriksaan |
|   |                                                                                                                        | Tindak lanjut pasca pendampingan tidak                                                                                                                                                             | Mengembangkan sistem <i>reminder</i> dan <i>checklist</i> digital bagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fungsi Pemeriksaan |

|   |                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                                                 | terpantau                                                                                                                        | UMKM untuk memantau pemenuhan standar secara mandiri, dengan kunjungan Balai POM sebagai verifikasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 6 | Meningkatnya efektivitas KIE                                    | Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah NTB dan kelompok sasaran secara optimal                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Konten Digital Lokal &amp; <i>Webinar/Live Session</i>.</li> <li>2. Strategi Kemitraan dan Perluasan Jaringan dengan lintas sektor serta Pemberdayaan Komunitas Lokal sebagai agen KIE.</li> <li>3. Penajaman dan Penyesuaian Kelompok Sasaran dengan Penggunaan Bahasa dan Dialek Lokal untuk meningkatkan pemahaman dan resonansi pesan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              | Fungsi Infokom                    |
|   |                                                                 | Menurunnya kepercayaan publik akibat misinformasi                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan protokol waktu respons untuk mengeluarkan tanggapan awal atau klarifikasi resmi, terutama untuk <i>hoax</i> risiko tinggi.</li> <li>2. Menciptakan <i>database</i> internal berisi <i>hoax</i> yang sering muncul beserta narasi tandingannya yang sudah disetujui (<i>pre-approved</i>, untuk mempercepat respons di masa mendatang.</li> <li>3. Pemanfaatan <i>Key Opinion Leader</i> (KOL) Lokal. Bekerja sama dengan <i>influencer</i> lokal (dokter, ahli gizi, tokoh masyarakat) yang memiliki kredibilitas untuk membantu menyebarkan pesan KIE resmi, memberikan validasi sosial.</li> </ol> | Fungsi Infokom                    |
| 7 | Layanan Publik UPT yang prima                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurun                                                                                         | Melakukan IKM/Survei Kepuasan Pelanggan secara rutin dan wajib menindaklanjuti area/dimensi layanan dengan nilai terendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fungsi Infokom                    |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>. Kebijakan anti korupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat</li> <li>. Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kepala Balai Besar POM di Mataram |

|  |  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|--|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  |  | Olahan                                                | Kepentingan, WBS,<br>Pengaduan Masyarakat,<br>Gratifikasi seluruh Unit Kerja.<br>Sosialisasi <i>Anti Fraud</i> .<br>Penguatan nilai-nilai anti<br>penyuapan dalam kerangka<br>kerja sistem manajemen<br>pengawasan |                             |
|  |  | Nilai Kinerja Anggaran &<br>Efisiensi Anggaran Rendah | Peningkatan akurasi<br>perencanaan anggaran sejak<br>awal tahun (DAK)<br>Melakukan <i>monitoring</i> realisasi<br>anggaran mingguan untuk<br>memastikan Tingkat Efisiensi<br>Penggunaan Anggaran<br>tercapai.      | Kepala Bagian<br>Tata Usaha |

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM**

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

**Tabel 3. 1** Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

| ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis | Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT |

| ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                | STRATEGI                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline | Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.                              |
| Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM                                                                                       | Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.                                                                                                   |
| Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                                                   | Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.                                                                       |
| Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                   | Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.                                                                                                                                            |
| Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.                                  | Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data                                        |
| Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.                           | Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran |

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Mataram

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM". Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG. Perluasan cakupan pengawasan BBPOM di Mataram pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya

pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

- 2) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara daring dan luring. Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BBPOM di Mataram meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik daring maupun luring.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM. BBPOM di Mataram fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BBPOM di Mataram mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
- 4) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama BBPOM di Mataram untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
- 5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BBPOM di Mataram memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk

meningkatkan kapabilitas BBPOM di Mataram dan kepercayaan terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BBPOM di Mataram.

- 6) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BBPOM di Mataram berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. BBPOM di Mataram memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Adapun Strategi Pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Mataram tahun 2025-2029 antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre-market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Mataram.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor di Kota Mataram, Kabupaten di Pulau Lombok, maupun Provinsi NTB secara umum.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM di Mataram termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Mataram.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana di BBPOM Mataram, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data yang komprehensif.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Mataram termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi BPOM secara menyeluruh, BBPOM di Mataram memfokuskan kegiatannya pada dua pilar utama, yaitu melaksanakan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM". Dalam lingkup pengawasan, BBPOM di Mataram bertanggung jawab atas pengawasan *pre* dan *post market* terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang secara spesifik juga mencakup pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Meskipun demikian, pengendalian *pre-market* dilakukan hanya dalam lingkup kewenangan tertentu dan tidak termasuk tugas penyusunan standar. Selain kegiatan pengawasan teknis, fungsi BBPOM juga meluas pada aspek kemitraan dan edukasi, di mana mereka aktif dalam pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan komunitas, advokasi, serta menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai lintas sektor terkait. Terakhir, sebagai satuan kerja di daerah, peran Balai tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas teknis pengawasan semata, melainkan juga harus menjalankan tugas-tugas manajerial yang penting dalam upaya konsisten mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM di tingkat daerah. Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Unit Organisasi/Satker BBPOM di Mataram juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Adapun kegiatan prioritas yang dilakukan BBPOM di Mataram dalam rangka mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Mataram

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, BBPOM di Mataram melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram mencakup pengawasan *pre*

dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Dalam implementasinya, pengawasan lapangan dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan *sampling* dan pengujian terhadap sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan olahan. Khusus untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, pengawalan mutu dilakukan secara ketat guna memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan bermutu. Proses ini didukung oleh peningkatan kapasitas laboratorium yang berkelanjutan untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) dan *Good Laboratory Practice* (GLP), mencakup pemenuhan ruang lingkup pengujian, kalibrasi peralatan, serta kompetensi personel.

Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Kewenangan ini dijalankan melalui pemeriksaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi untuk memastikan pemenuhan standar (CPOTB, CPKB, CPPOB, CDOB, dan SMKPO). Kegiatan ini mencakup penerbitan izin, rekomendasi, serta sertifikat hasil uji. Selaras dengan itu, pembinaan terhadap pelaku usaha, terutama sektor UMKM, terus diperkuat melalui pendampingan intensif agar mampu memenuhi standar produksi dan memiliki daya saing. Di sisi penegakan hukum (*post-market control*), BBPOM di Mataram melaksanakan penyidikan *pro-justitia* terhadap pelanggaran, yang mencakup gelar perkara, penerbitan SPDP ke Kejaksaan, hingga analisis kejahatan siber dan *profiling* pelaku pelanggaran daring sebagai bentuk deteksi dini.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan secara aktif melalui sosialisasi, kampanye publik, dan pendekatan berbasis komunitas ke sekolah maupun masyarakat umum. Upaya ini diperkuat dengan KIE Farmakovigilans bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran pelaporan efek samping obat. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan intervensi keamanan pangan di sekolah. Seluruh kegiatan ini dilengkapi

dengan advokasi lintas sektor yang dituangkan dalam laporan koordinasi pengawasan untuk memastikan tindak lanjut yang efektif. Selain itu, layanan informasi dan pengaduan publik disediakan melalui berbagai kanal untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, BBPOM di Mataram tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Upaya ini tercermin dari komitmen BBPOM di Mataram dalam menjaga mutu hasil pengujian melalui penggunaan alat standar, pengelolaan administrasi penyidikan yang tertib, serta transparansi dalam pelayanan publik. Pengelolaan manajemen internal yang baik ini menjadi landasan utama dalam mendukung keberhasilan seluruh fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

## 2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BBPOM di Mataram

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Balai Besar POM di Mataram berperan sebagai fungsi pendukung vital guna memastikan keberlangsungan operasional pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan ini difokuskan pada optimalisasi pelayanan internal yang mencakup tiga pilar utama: realisasi belanja pegawai, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), serta pemeliharaan infrastruktur operasional.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak dan kesejahteraan pegawai menjadi prioritas melalui pengelolaan belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara tertib, akurat, dan tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk menjaga motivasi dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Di sisi lain, akuntabilitas pengelolaan aset negara diperkuat melalui siklus manajemen BMN yang komprehensif, mulai dari penatausahaan, penilaian aset, proses pengalihan status, monitoring fisik, hingga penyusunan laporan BMN yang transparan dan sesuai regulasi. Selain itu, untuk menjamin kelancaran operasional harian, dilakukan pemeliharaan rutin kantor serta penyediaan sarana penunjang

operasional guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan fasilitas yang andal dalam mendukung seluruh kegiatan teknis di BBPOM di Mataram.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM, yaitu memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi. Kerangka kinerja BBPOM di Mataram untuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4. 1** Kerangka kinerja BBPOM di Mataram untuk Tahun 2025-2029

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                | Target |       |       |       |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|
|    |                                                                                                   |                                                                                  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 |
| 1  | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 89.00  | 90.25 | 91.50 | 92.75 | 94.0 |
|    |                                                                                                   | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah                              | 26     | 27    | 28    | 29    | 30   |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                          | Target |       |       |       |       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                  |                                                                                                                            | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|    |                  | melaporkan KTD/ESO                                                                                                         |        |       |       |       |       |
|    |                  | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                             | 92     | 93    | 94    | 95    | 96    |
|    |                  | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                           | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |                  | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                      | 85     | 87    | 89    | 92    | 95    |
|    |                  | Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 98.8   | 98.9  | 99.0  | 99.1  | 99.2  |
|    |                  | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                             | 91     | 93    | 95    | 96.5  | 98    |
|    |                  | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                               | 85     | 88    | 90    | 92    | 95    |
|    |                  | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                        | 96     | 96.88 | 97.75 | 98.63 | 99.50 |
|    |                  | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                             | 91     | 92    | 93    | 94    | 95    |
|    |                  | Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                           | 89.6   | 91.0  | 92.4  | 93.8  | 95.2  |

| No | Sasaran Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                | Target |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                          |                                                                                                                  | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 2  | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi   | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan                         | 92     | 93    | 94    | 95    | 96    |
|    |                                                                          | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                      | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |
|    |                                                                          | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium        | 81.7   | 85.7  | 87.4  | 91.1  | 92.6  |
|    |                                                                          | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                            | 20     | 40    | 60    | 80    | 100   |
|    |                                                                          | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                               | -      | 81    | 82    | 83    | 84    |
|    |                                                                          | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan        | 63     | 63    | 63    | 75    | 75    |
| 3  | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT          | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                   | 88.57  | 89.45 | 90.34 | 91.23 | 92.11 |
|    |                                                                          | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                     | 13     | 16    | 20    | 22    | 26    |
|    |                                                                          | Jumlah desa pangan aman                                                                                          | 4      | 6     | 7     | 7     | 7     |
|    |                                                                          | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                      | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau | 14.04  | 30.90 | 48.31 | 66.29 | 85.39 |

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                        | Target |       |       |       |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|
|    |                                                                                                         |                                                                                                          | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 |
|    |                                                                                                         | IP CPPOB Pangan Olahan                                                                                   |        |       |       |       |      |
| 5  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif                       | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                    | 92     | 94    | 96    | 98    | 100  |
| 6  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 90     | 91    | 92    | 93    | 94   |
| 7  | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                           | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              | 4.70   | 4.75  | 4.80  | 4.85  | 4.90 |
| 8  | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                          | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                            | 90.0   | 90.25 | 90.50 | 90.75 | 91.0 |
|    |                                                                                                         | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                      | 83.90  | 83.95 | 84.0  | 84.05 | 84.1 |
|    |                                                                                                         | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                          | 5      | 5     | 5     | 5     | 5    |
|    |                                                                                                         | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                         | 3.05   | 3.10  | 3.15  | 3.20  | 3.25 |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam Tabel 4.2. Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BBPOM di Mataram dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

**Tabel 4. 2** Kerangka pendanaan BBPOM di Mataram 2025-2029 berdasarkan Kegiatan

| Kegiatan                                         | Alokasi (dalam juta Rupiah) |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                  | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia | 10.808                      | 14.357 | 15.668 | 17.197 | 19.745 |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM            | 10.008                      | 13.294 | 14.508 | 15.925 | 18.284 |
| Total                                            | 20.816                      | 27.651 | 30.176 | 33.122 | 38.029 |

**Tabel 4. 3** Kerangka pendanaan BBPOM di Mataram 2025-2029 berdasarkan Sumber Dana

| Kegiatan                             | Alokasi (dalam juta Rupiah) |        |        |        |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                      | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| Rupiah Murni (RM)                    | 19.410                      | 26.245 | 28.770 | 31.716 | 36.623 |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 1.406                       | 1.406  | 1.406  | 1.406  | 1.406  |
| Total                                | 20.816                      | 27.651 | 30.176 | 33.122 | 38.029 |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Mataram Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2025-2029 memuat kebijakan umum berupa visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Mataram untuk 5 (lima) tahun kedepan. Pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Mataram Tahun 2020-2024 diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi serta Misi Badan POM untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mencapai harapan tersebut program dan kegiatan dalam Renstra Balai Besar POM di Mataram Tahun 2025-2029 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Renstra/RPJMN sebagai *midterm review*, maupun pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*.

Mengingat permasalahan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pembangunan kesehatan bersifat lintas sektor, maka dalam penyusunan rencana aksi maupun implementasinya, semangat koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan harus diutamakan. Kemitraan antar lembaga pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dengan swasta/ pelaku usaha merupakan salah satu faktor kunci dalam mensukseskan pembangunan kesehatan utamanya program pengawasan Obat dan Makanan.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
Di Mataram

Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Mataram tahun 2025-2029

| Kegiatan                                         | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output                                            |                                                                                  | Lokasi  | Target |       |      |       |        | Alokasi             |        |        |        |                                  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------|-------|--------|---------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                  |                                                                                            |                                                                                  |         |        |       |      |       |        | (Dalam Juta Rupiah) |        |        |        |                                  |                                  |
|                                                  | 2025                                                                                       | 2026                                                                             |         | 2027   | 2028  | 2029 | 2025  | 2026   | 2027                | 2028   | 2029   |        |                                  |                                  |
| Balai Besar POM di Mataram                       |                                                                                            |                                                                                  |         |        |       |      |       | 20.816 | 27.651              | 30.176 | 33.122 | 38.029 | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |                                  |
| Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia |                                                                                            |                                                                                  |         |        |       |      |       | 10.808 | 14.357              | 15.668 | 17.197 | 19.745 | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |                                  |
|                                                  | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |                                                                                  |         |        |       |      |       |        |                     |        |        |        | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |                                  |
|                                                  | 1                                                                                          | Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Mataram | 89     | 90,25 | 91,5 | 92,75 | 94     |                     |        |        |        |                                  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|                                                  | 2                                                                                          | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO           | Mataram | 26     | 27    | 28   | 29    | 30     |                     |        |        |        |                                  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output |                                                                                                                           | Lokasi  | Target |      |      |      |      | Alokasi             |      |      |  |  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|---------------------|------|------|--|--|---------------------------------|
|          |                                                 |                                                                                                                           |         |        |      |      |      |      | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |  |  |                                 |
|          | 2025                                            | 2026                                                                                                                      |         | 2027   | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027                | 2028 | 2029 |  |  |                                 |
|          | 3                                               | Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | Mataram | 92     | 93   | 94   | 95   | 96   |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | 4                                               | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | Mataram | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | 5                                               | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | Mataram | 85     | 87   | 89   | 92   | 95   |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | 6                                               | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Mataram | 98,8   | 98,9 | 99   | 99,1 | 99,2 |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | 7                                               | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | Mataram | 91     | 93   | 95   | 96,5 | 98   |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | 8                                               | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | Mataram | 85     | 88   | 90   | 92   | 95   |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output |                                                                                                           | Lokasi  | Target |       |       |       |      | Alokasi             |      |      |  |  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|------|---------------------|------|------|--|--|----------------------------------|
|          |                                                 |                                                                                                           |         |        |       |       |       |      | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |  |  |                                  |
|          | 2025                                            | 2026                                                                                                      |         | 2027   | 2028  | 2029  | 2025  | 2026 | 2027                | 2028 | 2029 |  |  |                                  |
|          | 9                                               | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan       | Mataram | 96     | 96,88 | 97,75 | 98,63 | 99,5 |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 10                                              | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | Mataram | 91     | 92    | 93    | 94    | 95   |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 11                                              | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | Mataram | 89,6   | 91    | 92,4  | 93,8  | 95,2 |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 12                                              | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                    | Mataram | 92     | 93    | 94    | 95    | 96   |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 13                                              | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               | Mataram | 100    | 100   | 100   | 100   | 100  |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 14                                              | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Mataram | 81,7   | 85,7  | 87,4  | 91,1  | 92,6 |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output                                                                  |                                                                                       | Lokasi  | Target |      |      |      |      | Alokasi             |      |      |  |  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|---------------------|------|------|--|--|---------------------------------|
|          |                                                                                                                  |                                                                                       |         |        |      |      |      |      | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |  |  |                                 |
|          | 2025                                                                                                             | 2026                                                                                  |         | 2027   | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027                | 2028 | 2029 |  |  |                                 |
|          | 15                                                                                                               | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Mataram | 20     | 40   | 60   | 80   | 100  |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | 16                                                                                                               | Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                    | Mataram | -      | 81   | 82   | 83   | 84   |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans                                           |                                                                                       | Mataram | 45     | 45   | 45   | 45   | 45   |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                                     |                                                                                       | Mataram | 446    | 446  | 575  | 575  | 575  |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT      |                                                                                       | Mataram | 992    | 1001 | 1054 | 1108 | 1166 |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                   |                                                                                       | Mataram | 46     | 52   | 57   | 63   | 69   |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT |                                                                                       | Mataram | 353    | 424  | 454  | 487  | 520  |                     |      |      |  |  | Balai Besar POM di Mataram      |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output                                                                  | Lokasi  | Target |      |      |      |      | Alokasi             |      |      |      |      | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                  |         |        |      |      |      |      | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                                 |
|          |                                                                                                                  |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                 |
|          | RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM | Mataram | -      | 204  | 204  | 216  | 216  |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia                                                         | Mataram | -      | -    | -    | -    | -    |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                        | Mataram | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                   | Mataram | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar                                                   | Mataram | -      | 508  | 508  | 508  | 508  |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                           | Mataram |        |      |      |      |      |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram      |
|          | 1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan      | Mataram | 63     | 63   | 63   | 75   | 75   |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram      |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output                                      |                                                                                | Lokasi  | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |  |  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|--|--|----------------------------------|
|          |                                                                                      |                                                                                |         |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |  |  |                                  |
|          | 2025                                                                                 | 2026                                                                           |         | 2027   | 2028  | 2029  | 2025  | 2026  | 2027                | 2028 | 2029 |  |  |                                  |
|          | RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT |                                                                                | Mataram | 5      | 5     | 5     | 6     | 6     |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | Meningkatnya efektivitas KIE                                                         |                                                                                | Mataram |        |       |       |       |       |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 1                                                                                    | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Mataram | 88,57  | 89,45 | 90,34 | 91,23 | 92,11 |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 2                                                                                    | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                   | Mataram | 13     | 16    | 20    | 22    | 26    |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 3                                                                                    | Jumlah desa pangan aman                                                        | Mataram | 4      | 6     | 7     | 7     | 7     |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 4                                                                                    | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                    | Mataram | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          |                                                                                      |                                                                                |         |        |       |       |       |       |                     |      |      |  |  |                                  |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output                          | Lokasi  | Target |      |      |      |      | Alokasi             |      |      |      |      | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                          |         |        |      |      |      |      | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |      |      |                                                                        |
|          |                                                                          |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                        |
|          | RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE            | Mataram | 2100   | 400  | 480  | 576  | 691  |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram, Dit, PMPU OTSKK, & Dit, PMPU Pangan Olahan |
|          | RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT      | Mataram | 35     | 12   | 13   | 14   | 15   |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram                                             |
|          | RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan              | Mataram | 13     | 16   | 20   | 22   | 26   |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram                                             |
|          | RO 4: Desa Pangan Aman                                                   | Mataram | 4      | 6    | 7    | 7    | 7    |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram                                             |
|          | RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas                               | Mataram | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram                                             |
|          | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Mataram |        |      |      |      |      |                     |      |      |      |      | Balai Besar POM di Mataram                                             |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output                                                                                           | Lokasi  | Target |       |       |       |       | Alokasi |      |      |      |      | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|------|------|------|------|----------------------------------|
|          |                                                                                                                                           |         |        |       |       |       |       |         |      |      |      |      |                                  |
|          |                                                                                                                                           |         | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                  |
|          | 1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Mataram | 14,04  | 30,90 | 48,31 | 66,29 | 85,39 |         |      |      |      |      | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT                                                                               | Mataram | 30     | 36    | 36    | 38    | 38    |         |      |      |      |      | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | <b>Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</b>                             | Mataram |        |       |       |       |       |         |      |      |      |      | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | 1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | Mataram | 92     | 94    | 96    | 98    | 100   |         |      |      |      |      | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan                                                                                       | Mataram | 6      | 6     | 6     | 6     | 6     |         |      |      |      |      | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|          | <b>Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</b>             | Mataram |        |       |       |       |       |         |      |      |      |      | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output |                                                                                                                   | Lokasi  | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |  |  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana                                             |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                 |                                                                                                                   |         |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |  |  |                                                                             |
|          | 2025                                            | 2026                                                                                                              |         | 2027   | 2028  | 2029  | 2025  | 2026  | 2027                | 2028 | 2029 |  |  |                                                                             |
|          | 1                                               | Persentase Laporan Analisis<br>Kejahatan Sediaan Farmasi dan<br>Pangan Olahan yang<br>diselesaikan sesuai standar | Mataram | 90     | 91    | 92    | 93    | 94    |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          |                                                 | RO 1: Laporan Analisis Kejahatan<br>Obat dan Makanan oleh UPT                                                     | Mataram | 14     | 14    | 15    | 15    | 15    |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          |                                                 | Layanan Publik UPT yang prima                                                                                     | Mataram |        |       |       |       |       |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          | 1                                               | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                       | Mataram | 4,70   | 4,75  | 4,80  | 4,85  | 4,90  |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          |                                                 | RO 1: Keputusan/Sertifikasi<br>Layanan Publik yang Diselesaikan<br>oleh UPT                                       | Mataram | 800    | 905   | 902   | 910   | 908   |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          |                                                 | Terwujudnya tatakelola<br>pemerintah Unit Organisasi yang<br>optimal                                              | Mataram |        |       |       |       |       |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          | 1                                               | Nilai Pembangunan ZI UPT<br>BPOM                                                                                  | Mataram | 90,00  | 90,25 | 90,50 | 90,75 | 91,00 |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram dan<br>Direktorat<br>Kedeputian<br>1,2,3,4 |

| Kegiatan | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output               |                                  | Lokasi  | Target |       |       |       |       | Alokasi             |      |      |  |  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                               |                                  |         |        |       |       |       |       | (Dalam Juta Rupiah) |      |      |  |  |                                                                             |
|          | 2025                                                          | 2026                             |         | 2027   | 2028  | 2029  | 2025  | 2026  | 2027                | 2028 | 2029 |  |  |                                                                             |
|          | 2                                                             | Nilai AKIP UPT BPOM              | Mataram | 83,90  | 83,95 | 84,00 | 84,05 | 84,10 |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          | 3                                                             | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  | Mataram | 5      | 5     | 5     | 5     | 5     |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          | 4                                                             | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | Mataram | 3,05   | 3,10  | 3,15  | 3,20  | 3,25  |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram dan<br>Direktorat<br>Kedeputian<br>1,2,3,4 |
|          | RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan          |                                  | Mataram | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram dan<br>Deputi<br>1,2,3,4                   |
|          | RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia |                                  | Mataram | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |
|          | RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi                  |                                  | Mataram | 8      | 8     | 8     | 8     | 8     |                     |      |      |  |  | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram                                            |

| Kegiatan                              | Sasaran<br>Kegiatan/Indikator/Rincian<br>Output                                                                     | Lokasi  | Target |      |      |      |      | Alokasi             |        |        |        |        | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|------|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
|                                       |                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      | (Dalam Juta Rupiah) |        |        |        |        |                                  |
|                                       |                                                                                                                     |         | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |                                  |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM |                                                                                                                     |         |        |      |      |      |      | 10.008              | 13.294 | 14.508 | 15.925 | 18.284 | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|                                       | RO 4: Layanan BMN<br><br>Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"         | Mataram | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                     |        |        |        |        | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |
|                                       | RO 5: Layanan Perkantoran<br><br>Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" | Mataram | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |                     |        |        |        |        | Balai Besar<br>POM di<br>Mataram |